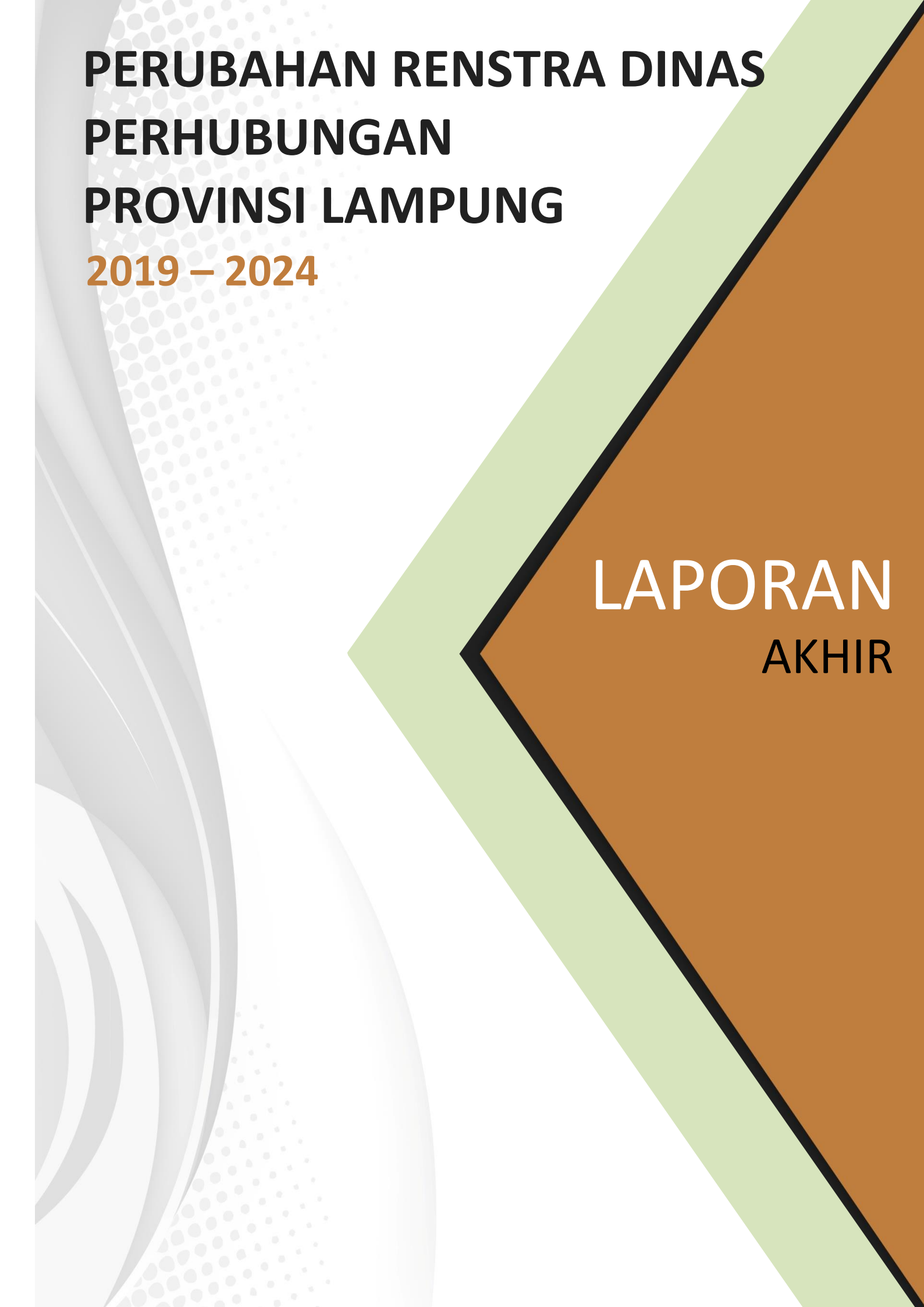


The cover features a white background with abstract grey wavy lines on the left and a large green arrow pointing right on the right. The arrow has a black outline and contains a brown triangle. The text is positioned in the upper left and within the arrow.

# **PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

**2019 – 2024**

**LAPORAN  
AKHIR**

## DAFTAR ISI

|                                                                     | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                                            | 1       |
| 1.1 Latar Belakang                                                  | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum                                                  | 4       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                               | 5       |
| 1.4 Sistematika Penulisan                                           | 6       |
| <b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN</b>                                     | 8       |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi                           | 8       |
| 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi                                        | 8       |
| 2.1.2 Struktur Organisasi                                           | 9       |
| 2.2 Sumber Daya                                                     | 12      |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia                                           | 12      |
| 2.2.2 Aset/Modal                                                    | 13      |
| 2.3 Kinerja Pelayanan                                               | 13      |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan                    | 20      |
| 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan                            | 23      |
| <b>BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>         | 35      |
| 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 35      |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur     | 41      |
| 3.3 Telaahan RPJMD Provinsi                                         | 44      |
| 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan                        | 45      |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis                                     | 48      |
| <b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN</b>                                     | 50      |
| 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah             | 50      |
| <b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                            | 52      |
| <b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>           | 53      |
| 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                      | 54      |
| 6.3 Indikator Kinerja                                               | 59      |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> | 81 |
| <b>BAB 8 PENUTUP</b>                               | 83 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Kualifikasinya | 12             |
| Tabel 2.2 Aset Dinas Tahun 2021                                                | 13             |
| Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019                 | 24             |
| Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah        | 50             |
| Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.                             | 52             |
| Tabel 6.1 Kebijakan dan Program                                                | 54             |
| Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                           | 54             |
| Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program                                            | 59             |
| Tabel 6.4 Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan                             | 60             |

# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke-IV (RPJMD IV) 2021-2024. Dokumen perencanaan ini akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh pemerintahan yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2019. Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan juga sedang mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2024. Baik RPJMD IV maupun RENSTRA disusun ditengah-tengah pertumbuhan perekonomian yang sangat dinamis bukan saja oleh karena kondisi perekonomian global yang fluktuatif akibat berbagai krisis akan tetapi juga karena perekonomian nasional yang relatif stabil namun tetap masih rentan terhadap pengaruh global. RENSTRA adalah dokumen strategis OPD untuk menjalankan program-program RPJMD di sektornya masing-masing.

Mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Lampung. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Pada kenyataannya kemajuan perekonomian ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sedang mengalami defisit yang sangat serius di hampir semua lini: jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. Defisit ini menyebabkan daya dukung infrastruktur Indonesia dalam menopang

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkurang dan sangat tidak efisien dan biaya transportasi membengkak secara tidak proporsional.

Era pemerintahan baru 2021-2024 dengan RPJMD IV dan RENSTRA IV dipandang sangat strategis sekaligus sangat kritis. Strategis dalam pengertian inilah era dimana infrastruktur, transportasi, dan sistem pelayanan publik yang profesional harus dibangun secara radikal untuk menutup defisit dan kesenjangan yang sudah berakumulasi bertahun-tahun. Ini adalah pemerintahan dengan masa tugas 5 atau 10 tahun kedepan yang mengembangkan tugas untuk membangun transportasi sesuai dengan amanat undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Kritis dalam pengertian bahwa kegagalan untuk membangun infrastruktur transportasi akan membawa dampak negatif yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian, daya saing, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung. Peraturan Gubernur Lampung No. 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai tugas antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis di bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Angkutan dan Pelayan Multimoda, Teknis Sarana Prasarana dan Teknis Operasional Terminal Type B dan Pengelola Pelaksanaan Pelabuhan Regional, yaitu Pelabuhan Baru yang di kelola oleh Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra memuat strategi pembangunan transportasi, kebijakan umum, program, kewilayahan dan kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang

berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan transportasi. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintahan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung.

Renstra 2020-2024 akan berisi beberapa kebijakan sektor perhubungan, yaitu melakukan internalisasi dan integrasi isu-isu strategis lintas sektoral. Program strategis yang sudah ada sebelumnya mulai dilaksanakan dalam masa pemerintahan sekarang dan akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Beberapa rencana pengembangan sektor transportasi antara lain adalah pengembangan terminal type B, pengembangan pelabuhan regional, rencana pengembangan jalur ganda Kereta Api, pengembangan bandara termasuk bandara perintis, angkutan penyeberangan serta pengembangan transportasi perkotaan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 25/2004, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung merupakan bagian dari rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- g) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung
- h) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- i) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
- l) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;
- m) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- n) Peraturan Menteri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- o) Permendagri No 54 tahun 2010 tentang tata cara Musrenbang formulasi sasaran proyek;
- p) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung;
- q) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
- r) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- s) UU. No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- t) UU No. 38/2004 tentang Jalan) UU. No. 1/2009 tentang Penerbangan
- u) UU. No. 23/2007 tentang Perkeretaapian\*
- v) UU. No. 17/2008 tentang Pelayaran
- w) PP No. 8/2011 tentang Angkutan Multimoda
- x) Kepmenhub No. 49/2005 tentang Sistranas (Sistem Transportasi Nasional)
- y) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda
- z) PerPres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2020 - 2024), untuk melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan 2020– 2024 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 adalah untuk menetapkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2020 – 2040 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024. Secara lebih rinci tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Provinsi Lampung selama 5 tahun.
2. Menyiapkan tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja yang berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Pemmasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3.3 Telaahan RPJMD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

##### **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Kebijakan dan Program
- 6.2 Rencana Program dan Kegiatan
- 6.3 Indikator Kinerja Program
- 6.4 Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN**

# Bab 2

## Gambaran Pelayanan

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, teratur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Dinas Perhubungan, merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi ( desentralisasi ) di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
- b. penyusunan kebijakan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan jalan provinsi;

- c. penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang type B;
- d. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan penyelenggaraan melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. penetapan tarif penumpang bus antara kabupaten/kota dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan provinsi;
- f. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitasi pendukung di jalan provinsi;
- g. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
- h. penyusunan dan penetapan rencana lalu lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
- i. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian;
- j. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
- k. pengelolaan pelaksanaan pelabuhan regional lama dan pelabuhan baru yang dikelola provinsi;
- k. pelayanan administratif.

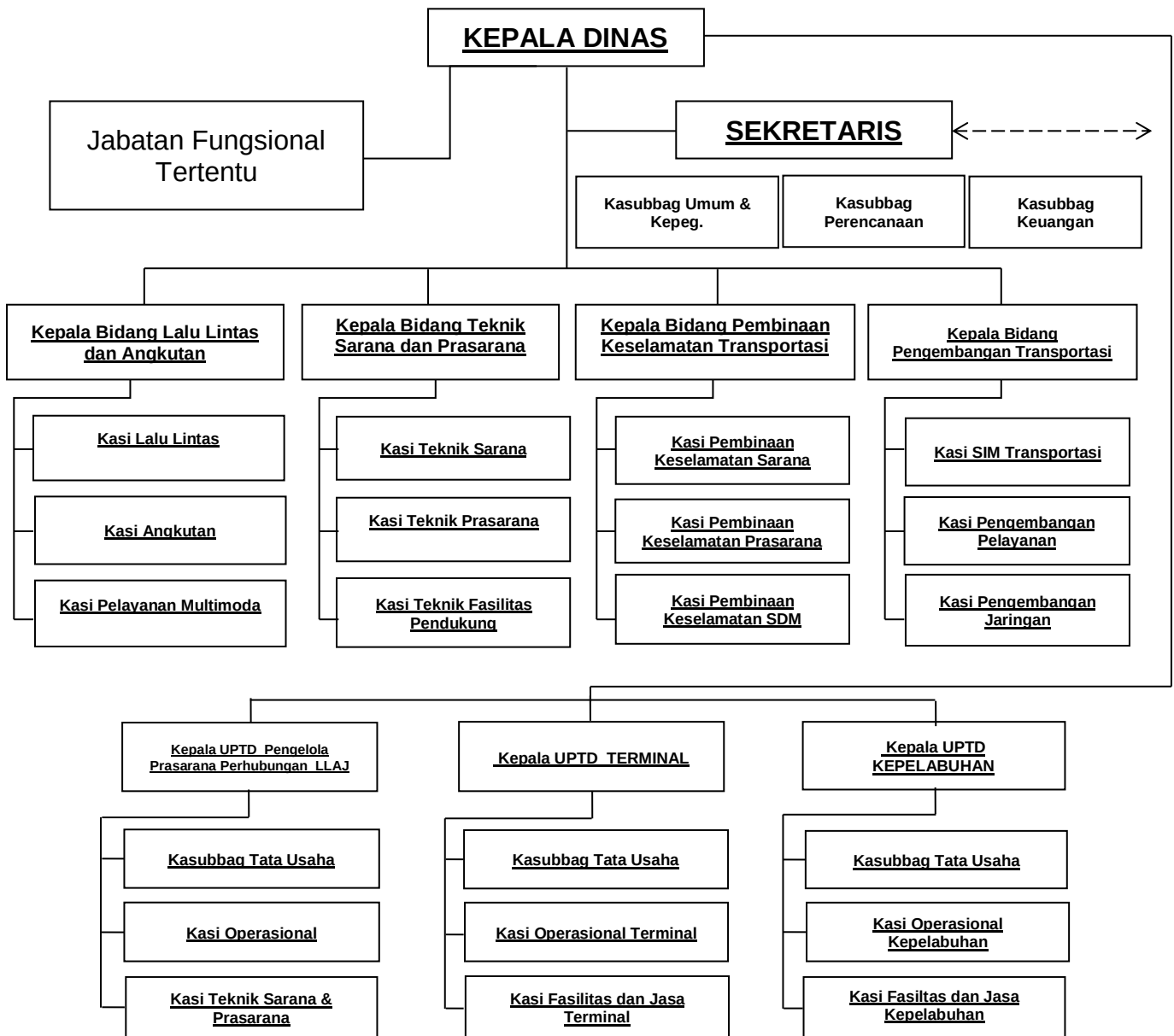
### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
  - 1) Seksi Lalu Lintas;
  - 2) Seksi Angkutan; dan
  - 3) Seksi Pelayanan Multimoda.
- d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahi:

- 1) Seksi Teknis Sarana;
  - 2) Seksi Teknis Prasarana; dan
  - 3) Seksi Teknik Fasilitas Pendukung.
- e. Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi, membawahi:
- 1) Seksi Pembinaan Keselamatan Sarana;
  - 2) Seksi Pembinaan Prasarana; dan
  - 3) Seksi Pembinaan Keselamatan Sumber Daya Manusia.
- f. Bidang Pengembangan Transportasi, membawahi:
- 1) Seksi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Transportasi;
  - 2) Seksi Pengembangan pelayanan; dan
  - 3) Seksi Pengembangan Jaringan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Lampung

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Bulan Desember tahun 2021 seluruhnya sebanyak 171 orang, terdiri dari 110 pegawai negeri sipil dan 61 orang tenaga kontrak, dengan rincian seperti Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Kualifikasinya

| JUMLAH<br>PEGAWAI | KUALIFIKASI<br>PENDIDIKAN | PANGKAT/GOL | JUMLAH PEJABAT |            |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------|
|                   |                           |             | STRUKTURAL     | FUNGSIONAL |
| PNS : 110         | S3 : 2                    | IV/d : -    | Ess IV = 24    | -          |
| PTHL : 61         | S2 : 22                   | IV/c : 1    | Ess III = 8    |            |
|                   | SI : 38                   | IV/b : 5    | Ess II = 1     |            |
|                   | D4 : 2                    | IV/a : 10   |                |            |
|                   | D3 : 4                    | III/d : 30  |                |            |
|                   | D2 : -                    | III/c : 8   |                |            |
|                   | DI : -                    | III/b : 17  |                |            |
|                   | SLTA : 40                 | III/a : 11  |                |            |
|                   | SLTP : 2                  | II/d : 15   |                |            |
|                   | SD : -                    | II/c : 11   |                |            |
|                   |                           | II/b : -    |                |            |
|                   |                           | II/a : 1    |                |            |
|                   |                           | I/d : 1     |                |            |
|                   |                           | I/c : -     |                |            |
|                   |                           | I/b : -     |                |            |
|                   |                           | I/a : -     |                |            |

Menurut jenjang pendidikan lebih dari 30% sarjana dan lebih dari 28% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 68% PNS dan hanya 32% Tenaga Kontrak. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 30 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II = 1 jabatan, Eselon III = 8 jabatan, Eselon IV = 24 jabatan.



### 2.2.2 Aset/Modal

Aset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Aset Dinas Tahun 2021

| NO | SARANA DAN PRASARANA          | JUMLAH     | KONDISI    |             | KET |
|----|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
|    |                               |            | BAIK       | KURANG BAIK |     |
| 1  | 2                             | 3          | 4          | 5           | 6   |
| 1. | Gedung kantor                 | 50 unit    | 50 unit    | -           |     |
| 2. | Jembatan timbang              | 2 unit     | -          | 2 unit      |     |
| 3. | Mobil patroli dan operasional | 10 unit    | 8 unit     | 2 unit      |     |
| 4. | Rambu jalan                   | 1.229 buah | 1.151 bh   | 78 buah     |     |
| 5. | Pagar pengaman jalan          | 8.233 M'   | 8.143 M'   | 90 M'       |     |
| 6. | Deliniator                    | 1.204 buah | 1.181 buah | 14 buah     |     |
| 7. | Paku marka                    | 1.861 buah | 1.508 buah | 353 buah    |     |
| 8. | Traffic light                 | 51 buah    | 45 buah    | 8 buah      |     |

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Terdapat beberapa indikator kinerja sesuai dengan SPM, tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan sebagai berikut :

| Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                        | <b>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>    | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>         |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan dokumen |

| <b>Urusan / Bidang Urusan<br/>Pemerintah Daerah dan<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b> | <b>Indikator Kinerja<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | (Renstra, IKU, Renja, RKA, RKA-P, PK, RKT, ROK, TOR)                                                     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Jumlah dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD                                                                         |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Pelaporan (Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, monitoring)                                     |
|                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah bulan Terlaksananya<br/>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                         |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | -Jumlah Bulan Terbayarnya Gaji PNS dan Tunjangan                                                         |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                             | - Jumlah bulan pengelolaan anggaran kantor<br>- Metrai, Cek dan Pulsa Operator                           |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                 | Jumlah bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Akuntansi SKPD dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan |
|                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah<br/>pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah bulan Terlaksananya<br/>Administrasi Barang Milik Daerah<br/>pada Perangkat Daerah</b>         |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Jumlah bulan penatausahaan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                       |
|                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah bulan Terlaksananya<br/>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                      |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                             | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                | - Jumlah Peserta Pelajar Pelopor<br>- Jumlah Peserta AKUT                                                |
|                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Administrasi Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                                             | <b>Jumlah bulan Terlaksananya<br/>Administrasi Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah bulan tersediannya peralatan Listrik yang di butuhkan                                             |

| <b>Urusan / Bidang Urusan<br/>Pemerintah Daerah dan<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b> | <b>Indikator Kinerja<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                         | Jumlah bulan tersediannya peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan                                                                           |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | Jumlah bulan tersediannya barang cetakan dan penggadaan                                                                                     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                  | Jumlah surat kabar dan Bahan bacaan                                                                                                         |
| Penyediaan Bahan/Material                                                                 | Jumlah Bulan Penyediaan ATK dan pelaksanaan Pameran Pembangunan Lampung Fair                                                                |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 | Jumlah bulan penyediaan Jamuan Tamu Dinas dan makan minum rapat                                                                             |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Jumlah bulan Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                                             |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                   | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                              |
| Pengadaan Mebel                                                                           | Jumlah Pengadaan Mebel                                                                                                                      |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                         |
|                                                                                           |                                                                                                                                             |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               | <b>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                    |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                     | - Jumlah Tenaga Keamanan kantor<br>- Jumlah Tenaga PTHL<br>- Jumlah Tenaga Keamanan Kapal<br>- Jumlah Tenaga Kebersihan kantor dan Terminal |
|                                                                                           |                                                                                                                                             |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>              | <b>Jumlah bulan terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |

| <b>Urusan / Bidang Urusan<br/>Pemerintah Daerah dan<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                          | <b>Indikator Kinerja<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan                                                             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Kapal Bantuan 35 GT                                 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                                  |                                                                                            |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>LALU LINTAS DAN ANGKUTAN<br/>JALAN (LLAJ)</b>                                       | <b>Presentase Penyelenggaraan<br/>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>                       |
| <b>Pelaksanaan Penyusunan<br/>Rencana Induk Jaringan LLAJ<br/>Provinsi</b>                                         | <b>Jumlah Dokumen Rencana Induk<br/>Jaringan LLAJ Provinsi</b>                             |
| Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                           | Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi   |
| <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan<br/>di Jalan Provinsi</b>                                                         | <b>Tersedianya Fasilitas<br/>Perlengkapan jalan di jalan<br/>Provinsi</b>                  |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                    | Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan di jalan Provinsi                                      |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                   | Jumlah fasilitas LLAJ terehabilitasi                                                       |
| <b>Pengelolaan Terminal<br/>Penumpang Tipe B</b>                                                                   | <b>Jumlah lokasi Terminal<br/>Penumpang Tipe B</b>                                         |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                             | Jumlah lokasi rehabilitasi/pemeliharaan terminal tipe B dan pelabuhan regional terpelihara |

| <b>Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                   | <b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah bulan kegiatan pengaturan lalu lintas untuk tamu-tamu negara, dan petugas pam lalin di daerah rawan macet dengan lancar dan tertib</li> <li>- Jumlah aparaturnya pengatur lalu lintas</li> <li>- Jumlah terminal Type B beroperasi</li> <li>- Jumlah bulan kegiatan pengaturan lalu lintas untuk tamu-tamu negara, dan petugas pam lalindi daerah rawan macet dengan lancar dan tertib</li> </ul> |
| <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>                                 | <b>Jumlah bulan terlaksanannya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                           | Jumlah Dokumen desain manajemen dan rekayasa lalu lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                  | Jumlah usaha pengendalian pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi (Pengendalian ODOL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah bulan kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan Angkutan jalan (Forum LLAJ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Pembinaan Keselamatan Transportasi</li> <li>- Jumlah Kegiatan Penelitian DRK</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Urusan / Bidang Urusan<br/>Pemerintah Daerah dan<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                                                                                          | <b>Indikator Kinerja<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                                                                                                                | - Jumlah kegiatan Angkutan lebaran, Angkutan Haji, Natal dan Tahun Baru- Jumlah bulan kegiatan pengaturan lalu lintas untuk tamu-tamu negara, dan petugas pam lalindi daerah rawan macet dengan lancar dan tertib- Jumlah aparatatur pengatur lalu lintas                |
| <b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                           | <b>Jumlah Dokumen Pengembangan Pelayanan, Buku Perhubungan Dalam Angka dan Ketersediaan Teknologi sektor pelayanan jasa transportasi</b>                                                                                                                                 |
| Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengembangan Pelayanan, Buku Perhubungan Dalam Angka dan Ketersediaan Teknologi sektor pelayanan jasa transportasi                                                                                                                                        |
| <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                                     | <b>Jumlah bulan terlaksanannya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                               |
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                           | - Jumlah kendaraan yang memiliki dan tidak memiliki izin<br>- Jumlah Bulan pengawasan dan pemantauan angkutan penumpang                                                                                                                                                  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Presentase Pengelolaan Pelayaran</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas</b> | <b>Jumlah Bulan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas</b> |

| <b>Urusan / Bidang Urusan<br/>Pemerintah Daerah dan<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Indikator Kinerja<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas | Jumlah Bulan Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat                                       |
| <b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                 |
| Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Kebutuhan Pelabuhan Regional di Provinsi Lampung                                                                                               |
| Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pelabuhan Regional                                                                                                                             |
| <b>Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b> |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                 | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada Transportasi Laut                                      |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Tidak Ada Kewenangan Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Presentase Pengelolaan Perkeretaapian</b>                                                                                                          |
| <b>Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Jumlah Bulan Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api</b>                                           |
| Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada                                                                                                                                                                                     | Jumlah Bulan Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api                                                  |

| <b>Urusan / Bidang Urusan<br/>Pemerintah Daerah dan<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b> | <b>Indikator Kinerja<br/>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Jaringan Jalur Perkeretaapian<br>Kewenangan Provinsi                                      |                                                            |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### Tantangan :

- Kondisi prasarana dan sarana perhubungan yang sudah berumur tua dan terbatasnya anggaran untuk pembangunan baru. Kondisi prasarana/sarana perhubungan yang sudah tua sangat berpengaruh terhadap kinerja operasional. Penyediaan lahan untuk pembangunan terminal baru yang sesuai uu no.23 thn2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan terminal type B yang harus dikelola oleh OPD teknis diprovinsi yang ada di dinas.
- Masih banyaknya wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan pelayanan perhubungan akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Biaya penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang mahal merupakan salah satu kendala jangkauan pelayanan perhubungan ke wilayah terpencil.
- Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi yang dapat memenuhi harapan masyarakat baik kenyamanan, keamanan dan keselamatan sehingga perlu melakukan pembenahan secara bertahap. Kondisi yang masih menemui hambatan dan kendala dalam peningkatan pelayanan dan penggunaan prasarana/sarana transportasi adalah kuantitas dan kualitas sarana angkutan yang masih belum optimal.
- Peningkatan kinerja operasional dipengaruhi ketersediaan prasarana, sarana dan sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan sarana penunjang dalam mendukung kinerja operasional akan mempengaruhi produktifitas kinerja.
- Faktor keselamatan dan ketertiban penyelenggaraan transportasi merupakan tujuan penyelenggaraan transportasi. Perilaku masyarakat dan aparat dalam mewujudkan keselamatan dan ketertiban



sangat dibutuhkan kedisiplinan oleh semua pihak. Aspek kedisiplinan bagi pengguna prasarana dan sarana transportasi dari tahun ke tahun masih menemui kendala untuk ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan dengan berbagai cara belum terlihat hasilnya.

- f. Masih minimnya fasilitas keselamatan jalan
- g. Masih kurangnya kesadaran berlalulintas masyarakat dan pengusaha angkutan serta pengemudi. Selain itu hambatan lainnya adalah perilaku kurang disiplin dan tidak tertib dan cenderung melanggar. Upaya pembinaan baik yang bersifat teknis dan umum kepada aparat, operator dan pengguna jasa transportasi belum mampu menekan menurunnya disiplin masyarakat.
- h. Dominasi angkutan jalan sebagai moda transportasi darat
- i. Belum optimalnya keamanan operasional petugas SAR

**Peluang:**

- a. Perbaikan secara bertahap gedung terminal type B dan pembangunan gedung Bom terminal type B di beberapa titik daerah kabupaten /kab provinsi lampung, dengan menyesuaikan kondisi anggaran. Beberapa program yang terlaksana antara lain perbaikan gedung terminal secara bertahap serta penambahan rambu -rambu lalu lintas dan sarana perhubungan lainnya.
- b. Upaya menjangkau pelayanan transportasi sampai wilayah pelosok terpencil tidak cukup terpenuhi dari sektor perhubungan saja. Keterpaduan dengan instansi terkait dalam menjangkau wilayah terpencil akan tercapai secara sinergis dengan melaksanakan program terpadu. Upaya mengatasi permasalahan jangkauan pelayanan ke pelosok wilayah terpencil dengan menyiapkan program prioritas dan program keperintisan dengan pendanaan secara bertahap dan berkelanjutan.
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah peningkatan kualitas pelayanan, masalah disiplin, dengan membuat program pembinaan teknis dan umum secara kontinyu meningkatkan kemampuan profesional SDM/petugas di terminal.
- d. Untuk menunjang peningkatan kinerja operasional perlu ditambah sarana/prasarana serta fasilitas penunjang aparat dalam melakukan tugas

sesuai tugas pokok dan fungsi dinas. Selain itu untuk peningkatan kemampuan teknis, operasional maupun umum bagi aparaturnya untuk meningkatkan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugasnya. Meningkatkan kemampuan profesional SDM terminal dan awak angkutan dengan penyelenggaraan diklat teknis dan penyuluhan seperti Diklat Nahkoda kapal Layar Motor, Diklat Pemeriksa Roda Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan AKUT (Angkutan Kendaraan Umum Teladan) dan pembinaan disiplin angkutan umum

- e. Penambahan simpul terminal type B; fasilitas pendukung seperti lampu lalu lintas, rambu, pagar pengamanan, deliniator, rehabilitasi, relokasi, serta pembangunan baru terminal type B di kabupaten/ kota, ur, peningkatan keselamatan dengan memasang pintu perlintasan terutama di lokasi yang rawan kecelakaan dan volume lalu lintas tinggi sesuai standar teknis
- f. Perlunya pembinaan, sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat dan pengusaha angkutan serta pengemudi angkutan tersebut
- g. Pengembangan angkutan kereta api dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan, seperti: pengembangan infrastruktur rel khusus batubara melalui sinergitas dengan pihak swasta; pengembangan angkutan feeder sebagai angkutan massal perkotaan; pembangunan jalur short cut untuk menghindari kemacetan di ruas jalan perkotaan karena perlintasan dengan pintu KA; peralihan angkutan peti kemas dari jalan raya ke kereta api; program penambahan KRD Way Umpu untuk meningkatkan kapasitas lintas pelayanan Kereta Api Rute Bandar Lampung – Kota Bumi - Blambangan Umpu.
- h. Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai alternatif angkutan darat, seperti: pengembangan potensial arus barang melalui angkutan sungai di Way Seputih dan Teladas. Daerah dengan angkutan perairan daratan sebagai alternatif angkutan darat untuk mendukung pengembangan kawasan dan perekonomian masyarakat pesisir dan pedalaman. Pengembangan angkutan penyeberangan lain selain Bakauheni.
- i. Pengembangan moda laut seperti pengendalian operasional pelabuhan khusus; pengembangan pelabuhan rakyat dan angkutan laut perintis akan diarahkan untuk mengantisipasi mobilitas barang melalui laut. Kesiapan

fasilitas pelabuhan yang memadai sesuai hirarki peran dan fungsi pelabuhan lokal, regional, nasional dan internasional untuk melayani kapal pelayaran rakyat, nasional dan asing. Diantaranya pembangunan prasarana dan sarana serta manajemen berstandar internasional Pelabuhan Panjang menjadi Pelabuhan Laut Internasional. Pembangunan pelabuhan di Dermaga Canti Kabupaten Lampung Selatan dan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

- j. Pengembangan angkutan udara seperti: pengembangan terminal internasional di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan; Pengoperasian dan pengembangan Bandar Udara Pekon Serai sebagai alternatif angkutan udara dari dan ke Kabupaten Pesisir Barat; Pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan yang standar dan antisipasi penanggulangan bencana alam; MoU pemprov, pemkab dan pihak LanudAD untuk pengembangan Bandara Gatot Subroto menjadi bandara sipil. Pengembangan ini terus diupayakan mengingat sangat penting dan strategis untuk membuka keterisolasian dan pengembangan perekonomian masyarakat di perbatasan Sumatera Selatan.
- k. Perlu pelatihan secara intensif pendidikan SAR untuk mendukung SAR Daerah Provinsi Lampung yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk mengantisipasi pertolongan pertama kecelakaan transportasi.

## **2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan**

Dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur Lampung Berjaya serta mengembangkan transportasi yang handal guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas angkutan penumpang dan barang, sehingga terpeliharanya kualitas pelayanan perhubungan, maka kinerja Dinas Perhubungan selama kurun waktu Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat  
 Indikator Sasaran : Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

| Indikator Kinerja                                                                           | Program Prioritas                                    | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                        | Pagu Indikatif (x 1000 )/ Kinerja |                         |           |                         |           |                         |           |                         |           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|                                                                                             |                                                      |                                                                     |                                                                                          | 2015                              |                         | 2016      |                         | 2017      |                         | 2018      |                         | 2019      |                         |
|                                                                                             |                                                      |                                                                     |                                                                                          | Pagu                              | Kinerja                 | Pagu      | Kinerja                 | Pagu      | Kinerja                 | Pagu      | Kinerja                 | Pagu      | Kinerja                 |
| <b>1. Persentase terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi</b> | <b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> | 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat                                   | Jumlah surat menyurat                                                                    | 15,000                            | 6rb Surat masuk/ Keluar | 15,000    | 6rb Surat masuk/ Keluar | 15,000    | 6rb Surat masuk/ Keluar | 15,000    | 6rb Surat masuk/ Keluar | 15,000    | 6rb Surat masuk/ Keluar |
|                                                                                             |                                                      | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik           | Jumlah terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air                             | 294,000                           | 12 Bulan                | 325,000   | 12 Bulan                | 325,000   | 12 Bulan                | 325,000   | 12 Bulan                | 325,000   | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Prosentase Bulanan pengelolaan anggaran kantor                                           | 1,088,000                         | 12 Bulan                | 1,200,000 | 12 Bulan                | 1,200,000 | 12 Bulan                | 1,200,000 | 12 Bulan                | 1,200,000 | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Indeks jasa kebersihan lingkungan kantor                                                 | 100,000                           | 12 Bulan                | 100,000   | 12 Bulan                | 100,000   | 12 Bulan                | 100,000   | 12 Bulan                | 100,000   | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Prosentase keberhasilan penyediaan alat tulis kantor                                     | 40,000                            | 12 Bulan                | 40,000    | 12 Bulan                | 40,000    | 12 Bulan                | 40,000    | 12 Bulan                | 40,000    | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Prosentase keberhasilan penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 60,000                            | 12 Bulan                | 60,000    | 12 Bulan                | 60,000    | 12 Bulan                | 60,000    | 12 Bulan                | 60,000    | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Prosentase keberhasilan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18,300                            | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga                                | Prosentase keberhasilan penyediaan peralatan rumah tangga                                | 17,500                            | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                | 20,000    | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan         | Jumlah surat kabar dan bacaan                                                            | 30,000                            | 7 Eksemplar             | 30,000    | 7 Eksemplar             | 30,000    | 7 Eksemplar             | 30,000    | 7 Eksemplar             | 30,000    | 7 Eksemplar             |
|                                                                                             |                                                      | 10. Penyediaan Makanan dan Minuman                                  | Prosentase keberhasilan penyediaan makan dan minum peserta rapat                         | 50,000                            | 12 Bulan                | 50,000    | 12 Bulan                | 50,000    | 12 Bulan                | 50,000    | 12 Bulan                | 50,000    | 12 Bulan                |
|                                                                                             |                                                      | 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah               | Posentase Bulanan perjalanan dinas luar daerah                                           | 400,000                           | 12 Bulan                | 400,000   | 12 Bulan                | 400,000   | 12 Bulan                | 400,000   | 12 Bulan                | 400,000   | 12 Bulan                |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

| Indikator Kinerja                                        | Program Prioritas                                    | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Pagu Indikatif (x 1000 )/ Kinerja |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|                                                          |                                                      |                                                           |                                                                                                                                            | 2015                              |          | 2016    |          | 2017    |          | 2018    |          | 2019    |          |
|                                                          |                                                      |                                                           |                                                                                                                                            | Pagu                              | Kinerja  | Pagu    | Kinerja  | Pagu    | Kinerja  | Pagu    | Kinerja  | Pagu    | Kinerja  |
|                                                          |                                                      | 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah    | Prosentase bulanan perjalanan dinas dalam daerah                                                                                           | 125,000                           | 12 Bulan | 125,000 | 12 Bulan | 125,000 | 12 Bulan | 125,000 | 12 Bulan | 125,000 | 12 Bulan |
|                                                          |                                                      | 13. Penyediaan Biaya Publikasi                            | Prosentase keberhasilan penyediaan publikasi media cetak dan elektronik, promosi perhubungan, pameran pembangunan dan Pawai Kendaraan Hias | 250,000                           | 5 Paket  | 250,000 | 5 Paket  | 250,000 | 5 Paket  | 250,000 | 5 Paket  | 250,000 | 5 Paket  |
|                                                          |                                                      | 14. Jasa penyewaan sewa kendaraan                         | Prosentase bulanan Penyewaan bus dan kereta api untuk kunjungan pejabat dalam acara tertentu                                               | 250,000                           | 1 Paket  | 300,000 | 1 Paket  | 300,000 | 1 Paket  | 300,000 | 1 Paket  | 300,000 | 1 Paket  |
|                                                          |                                                      | 15. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD                | Prosentase bulanan terlaksananya pengembangan pengelolaan keuangan SKPD                                                                    | 224,000                           | 12 Bulan | 224,000 | 12 Bulan | 224,000 | 12 Bulan | 224,000 | 12 Bulan | 224,000 | 12 Bulan |
|                                                          |                                                      | 16. Penatausahaan Aset                                    | Prosentase bulanan Terlaksananya penataan aset dinas perhubungan                                                                           |                                   |          |         |          |         |          | 50,000  | 12 Bulan | 50,000  | 12 Bulan |
| 2. Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | Jumlah perlengkapan gedung kantor                                                                                                          | 70,000                            | 7 buah   | 70,000  | 7 buah   | 70,000  | 7 buah   | 70,000  | 7 buah   | 70,000  | 7 buah   |
|                                                          |                                                      | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                      | Jumlah peralatan gedung kantor                                                                                                             | 55,000                            | 23 buah  | 55,000  | 23 buah  | 55,000  | 23 buah  | 55,000  | 23 buah  | 55,000  | 23 buah  |
|                                                          |                                                      | 3. Pengadaan Komputer                                     | Jumlah pengadaan komputer                                                                                                                  | 40,000                            | 4 Unit   | 40,000  |          |         |          |         | 4 Unit   | 40,000  | 4 Unit   |
|                                                          |                                                      | 4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor               | Jumlah gedung kantor yang dilakukakn pemeliharaan                                                                                          | 44,500                            | 1 Paket  | 44,500  | 1 Paket  | 44,500  | 1 Paket  | 44,500  | 1 Paket  | 44,500  | 1 Paket  |
|                                                          |                                                      | 5. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan               | Jumlah mobil jabatan                                                                                                                       | 40,000                            | 2 Unit   | 60      | 2 Unit   | 80      | 2 Unit   | 100     | 2 Unit   | 100     | 2 Unit   |
|                                                          |                                                      | 6. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional                                                                                                         | 80,000                            | 12 unit  | 100,000 | 12 unit  | 100,000 | 12 unit  | 125,000 | 12 unit  | 150,000 | 12 unit  |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat  
Indikator Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

| Indikator Kinerja                                                                    | Program Prioritas                                                                 | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                   | Pagu Indikatif (x 1000 )/ Kinerja |            |         |            |         |            |         |            |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
|                                                                                      |                                                                                   |                                                                     |                                                                                     | 2015                              |            | 2016    |            | 2017    |            | 2018    |            | 2019    |            |
|                                                                                      |                                                                                   |                                                                     |                                                                                     | Pagu                              | Kinerja    | Pagu    | Kinerja    | Pagu    | Kinerja    | Pagu    | Kinerja    | Pagu    | Kinerja    |
|                                                                                      |                                                                                   | 7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor               | Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin                    | 150,000                           | 4 Paket    | 150,000 | 4 Paket    | 150,000 | 4 Paket    | 150,000 | 4 Paket    | 150,000 | 4 Paket    |
|                                                                                      |                                                                                   | 8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                            | Jumlah kendaraan dinas operasional                                                  |                                   |            | 600,000 | 1 Unit     | 600,000 | 1 Unit     |         |            |         |            |
| 3. Persentase Peningkatan disiplin aparatur                                          | 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                  | Jumlah pakaian dinas pegawai                                                        | 130,500                           | 260 buah   | 150,000 | 260 buah   | 150,000 | 260 buah   | 150,000 | 260 buah   | 150,000 | 260 buah   |
| 4. Persentase Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur                            | 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 1. Pendidikan dan pelatihan kursus singkat                          | Prosentase bulanan peserta diklat                                                   | 75,000                            | 12 bulan   | 100,000 | 12 bulan   | 150,000 | 12 bulan   | 150,000 | 12 bulan   | 175,000 | 12 bulan   |
| 5. Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          | 60,000                            | 2 Dokum en | 60,000  | 2 Dokum en | 60,000  | 2 Dokum en | 60,000  | 2 Dokum en | 60,000  | 2 Dokum en |
| 6. Persentase meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan           | 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                        | 1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Prosentase Bulanan terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi bidang perhubungan | 195,200                           | 12 Bulan   | 218,200 | 12 Bulan   | 200,000 | 12 Bulan   | 200,000 | 12 Bulan   | 225,000 | 12 Bulan   |
|                                                                                      |                                                                                   | 2. Monitoring dan Evaluasi                                          | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi                                              | 200,000                           | 1 Dokum en | 200,000 | 1 Dokum en | 200,000 | 1 Dokum en | 200,000 | 1 Dokum en | 200,000 | 1 Dokum en |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

| Indikator Kinerja | Program Prioritas | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |             |         |             |         |             |         |             |         |             |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                   |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 2015                             |             | 2016    |             | 2017    |             | 2018    |             | 2019    |             |
|                   |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | Pagu                             | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     |
|                   |                   | 3. Rapat koordinasi jajaran jajaran sektor perhubungan se Indonesia serta rakor jajaran sektor perhubungan di daerah | Prosentase bulanan Terlaksananya Rapat Koordinasi antar jajajaran sektor perhubungan (termasuk kegiatan forum MPU, BELAJASUMBA, dan forum Gubernur se-Sumatera)                           | 150,000                          | 12 Bulan    | 150,000 | 12 Bulan    | 150,000 | 12 Bulan    | 150,000 | 12 Bulan    | 150,000 | 12 Bulan    |
|                   |                   | 4. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan                                                  | Prosentase Bulanan terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi bidang perhubungan                                                                                                       | 195,200                          | 12 Bulan    | 218,200 | 12 Bulan    | 200,000 | 12 Bulan    | 200,000 | 12 Bulan    | 225,000 | 12 Bulan    |
|                   |                   | 5. Koordinasi Pelaksanaan RAD Emisi GRK Prov. Lampung Sektor Transportasi Bidang Energi                              | Prosentase bulanan Terselenggaranya koordinasi Rakor Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)                                                                                         | 175,000                          | 12 Bulan    | 175,000 | 12 Bulan    | 175,000 | 12 Bulan    | 185,000 | 12 Bulan    | 185,000 | 12 Bulan    |
|                   |                   | 6. Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan                                                                        | jumlah dokumen Perencanaan (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR) dan Pelaporan (Lakip, LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, Aset Daerah SKPD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung | 150,000                          | 14 Dokum en | 150,000 | 14 Dokum en | 150,000 | 14 Dokum en | 150,000 | 14 Dokum en | 150,000 | 14 Dokum en |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran : Persentase Pelayanan Jasa Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian

| Indikator Kinerja                                    | Program Prioritas                                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                     | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |                       |           |                       |           |            |           |            |           |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                                      |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                       | 2015                             |                       | 2016      |                       | 2017      |            | 2018      |            | 2019      |            |
|                                                      |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                       | Pagu                             | Kinerja               | Pagu      | Kinerja               | Pagu      | Kinerja    | Pagu      | Kinerja    | Pagu      | Kinerja    |
| <b>1. Persentase Meningkatnya pelayanan angkutan</b> | <b>1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> | 1. Pengendalian dan Pengawasan disiplin Pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi                            | Prosentase bulanan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi | 800,000                          | 12 bulan              | 800,000   | 12 bulan              | 800,000   | 12 bulan   | 1,000,000 | 12 bulan   | 1,000,000 | 12 bulan   |
|                                                      |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                  |                       | 1,500,000 | 1 Paket               | 1,500,000 | 1 Paket    | 1,500,000 | 1 Paket    | 1,500,000 | 1 Paket    |
|                                                      |                                                  | 2. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan                                                               | Jumlah buku perhubungan dalam angka dan website                                                                       | 200,000                          | 20 Buku dan 1 website | 200,000   | 20 Buku dan 1 website | 200,000   | 20 Buku    | 200,000   | 20 Buku    | 200,000   | 20 Buku    |
|                                                      |                                                  | 3. Pengawasan dan Pemantauan Operasional KRD Semirang (non AC) dan KRD Way Umpu (AC)                                        | Jumlah pengawasan dan pemantauan angkutan penumpang                                                                   | 150,000                          | 2 kegiatan            | 150,000   | 2 Kegiatan            | 150,000   | 2 Kegiatan | 150,000   | 2 Kegiatan | 150,000   | 2 Kegiatan |
|                                                      |                                                  | 4. Pembinaan dan pengawasan Pengusaha angkutan umum dan pengujian kendaraan bermotor, Pengusaha karoseri Kendaraan Bermotor | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan angkutan                                                                     | 50,000                           | 2 Kegiatan            | 50,000    | 2 Kegiatan            | 50,000    | 2 Kegiatan | 50,000    | 2 Kegiatan | 50,000    | 2 Kegiatan |
|                                                      |                                                  | 5. Pengawasan Pelayanan Angkutan Terusan di Bandara Radin Inten II dan Bakauheni                                            | Prosentase bulan pelayanan angkutan terusan yang dilakukan pengawasan guna kelancaran pelayanan angkutan              | 110,000                          | 12 Bulan              | 150,000   | 12 Bulan              | 150,000   | 12 Bulan   | 150,000   | 12 Bulan   | 150,000   | 12 Bulan   |
|                                                      |                                                  | 6. Pemantauan Pelayanan Penumpang di Bandara Radin Inten II                                                                 | Prosentase Bulan pelayanan penumpang yang dilakukan pemantauan                                                        | 300,000                          | 12 Bulan              | 300,000   | 12 Bulan              | 300,000   | 12 Bulan   | 300,000   | 12 Bulan   | 300,000   | 12 Bulan   |
|                                                      |                                                  | 7. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pelabuhan Khusus                                                                         | Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis dan TUKS di Provinsi Lampung                                                   | 100,000                          | 1 Paket               | 150,000   | 1 Paket               | 150,000   | 1 Paket    | 150,000   | 1 Paket    | 150,000   | 1 Paket    |



Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran : Persentase Pelayanan Jasa Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian

| Indikator Kinerja | Program Prioritas | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |                |         |                |         |                |         |                |         |                |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                   |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 2015                             |                | 2016    |                | 2017    |                | 2018    |                | 2019    |                |
|                   |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                            | Pagu                             | Kinerj<br>a    | Pagu    | Kinerj<br>a    | Pagu    | Kinerj<br>a    | Pagu    | Kinerj<br>a    | Pagu    | Kinerj<br>a    |
|                   |                   | 8. Pembinaan dan pengawasan teknis bandara di Provinsi Lampung                                | Prosentase bulanan Terpantaunya fasilitas sarana dan prasarana bandara yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan di bandara umum dan bandara khusus di Provinsi Lampung | 121,000                          | 12 Bulan       | 100,000 | 12 Bulan       | 150,000 | 12 Bulan       | 150,000 | 12 Bulan       | 150,000 | 12 Bulan       |
|                   |                   | 9. Sistem Informasi Perijinan Angkutan Umum, Survei Load Faktor dan Kinerja Bus AKDP dan AKAP | Jumlah data dan informasi angkutan umum                                                                                                                                    | 125,000                          | 3 Paket        | 100,000 | 3 Paket        | 100,000 | 3 Paket        | 110,000 | 3 Paket        | 120,000 | 3 Paket        |
|                   |                   |                                                                                               | Jumlah data angkutan umum, survei load factor dan kinerja Bus AKDP dan AKAP di Prov. Lpg                                                                                   |                                  |                |         |                |         |                |         |                |         |                |
|                   |                   |                                                                                               | Study angkutan perbatasan di Provinsi Lampung                                                                                                                              |                                  |                |         |                |         |                |         |                |         |                |
|                   |                   | 10. Pembinaan Angkutan Laut                                                                   | Jumlah Pengawasan dan pembinaan Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat                                                                                    | 100,000                          | 2 Kegiata<br>n | 150,000 | 2 Kegiata<br>n | 150,000 | 2 Kegiata<br>n | 150,000 | 2 Kegiata<br>n | 150,000 | 2 Kegiata<br>n |
|                   |                   | 11. Pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran                                            | Prosentase bulan Pengawasan dan penertiban kelengkapan keselamatan kapal                                                                                                   | 150,000                          | 12 Bulan       | 150,000 | 12 Bulan       | 150,000 | 12 Bulan       | 200,000 | 12 Bulan       | 200,000 | 12 Bulan       |
|                   |                   | 12. Pemantauan Pengusahaan angkutan umum di Provinsi Lampung                                  | Prosentase bulan Monitoring Angkutan umum penumpang dan Barang                                                                                                             |                                  |                |         |                |         |                | 100,000 | 12 Bulan       | 150,000 | 12 bulan       |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran : Persentase Pelayanan Jasa Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian

| Indikator Kinerja                                                 | Program Prioritas                                                            | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |         |           |         |           |         |           |            |           |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                                                   |                                                                              |                                                                     |                                                                                  | 2015                             |         | 2016      |         | 2017      |         | 2018      |            | 2019      |            |
|                                                                   |                                                                              |                                                                     |                                                                                  | Pagu                             | Kinerja | Pagu      | Kinerja | Pagu      | Kinerja | Pagu      | Kinerja    | Pagu      | Kinerja    |
|                                                                   |                                                                              |                                                                     | Pembinaan Usaha Angkutan Umum dan ASDP                                           |                                  |         |           |         |           |         |           |            |           |            |
|                                                                   |                                                                              | 13. Pengawasan Pelayanan Angkutan                                   | Jumlah Pelayanan Angkutan yang dilakukan Pengawasan                              |                                  |         |           |         |           |         | 200,000   | 1 Kegiatan | 250,000   | 1 Kegiatan |
|                                                                   |                                                                              | 14. Pengoperasian Bus Aglomerasi                                    | Jumlah Beroperasinya Bus Aglomerasi                                              |                                  |         |           |         |           |         | 600,000   | 1 Paket    | 700,000   | 1 Paket    |
|                                                                   |                                                                              | 15. Penyusunan Raperda Pengoperasian Terminal Type B                | Jumlah Dokumen Hukum (Raperda/Perda) Pengoperasian Terminal Type B               |                                  |         |           |         |           |         | 225,000   | 1 Dokumen  |           |            |
|                                                                   |                                                                              | 16. Pengembangan Sistem Informasi Transportasi Lampung              | Jumlah Fasilitas Sistem Informasi Transportasi                                   |                                  |         |           |         |           |         | 150,000   | 1 Paket    | 200,000   | 1 Paket    |
|                                                                   |                                                                              | 17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Provinsi Lampung          | Jumlah Desain manajemen dan rekayasa lalu lintas                                 |                                  |         |           |         |           |         | 200,000   | 1 Kegiatan | 250,000   | 1 Kegiatan |
| <b>2. Persentase Meningkatnya pemeliharaan dan fasilitas LLAJ</b> | <b>2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b> | 1. Rehabilitasi /pemeliharaan sarana dan prasarana UPPKB            | Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan Pemeliharaan                          | 400,000                          | 1 Paket | 850,000   | 1 Paket | 900,000   | 1 Paket | 850,000   | 1 Paket    | 850,000   | 1 Paket    |
|                                                                   |                                                                              | 2. Pemeliharaan Fasilitas LLAJ                                      | Jumlah fasilitas keselamatan Jalan di jalan provinsi yang dilakukan pemeliharaan | 50,000                           | 1 Paket | 50,000    | 1 Paket | 50,000    | 1 Paket | 50,000    | 1 Paket    | 50,000    | 1 Paket    |
| <b>3. Persentase pembangunan dan prasarana perhubungan</b>        | <b>3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>               | 1. Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Perhubungan | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana darat                                    | 2,300,000                        | 1 Paket | 2,300,000 | 1 Paket | 3,500,000 | 2 Paket | 3,855,000 | 2 Paket    | 3,830,000 | 3 Paket    |
|                                                                   |                                                                              |                                                                     | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana parkir                                   |                                  | 1 Paket |           | 1 Paket |           | 1 Paket |           | 2 Paket    |           | 3 Paket    |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran : Persentase Pelayanan Jasa Perhubungan Lalu Lintas Anlutan Darat dan Perkeretaapian

| Indikator Kinerja                                                                 | Program Prioritas                                                 | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                       | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |               |            |               |           |               |           |               |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                   |                                                                   |                                                                           |                                                                                         | 2015                             |               | 2016       |               | 2017      |               | 2018      |               | 2019        |               |
|                                                                                   |                                                                   |                                                                           |                                                                                         | Pagu                             | Kinerj<br>a   | Pagu       | Kinerj<br>a   | Pagu      | Kinerj<br>a   | Pagu      | Kinerj<br>a   | Pagu        | Kinerj<br>a   |
|                                                                                   |                                                                   |                                                                           | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana laut                                            |                                  |               |            | 1 Paket       |           | 1 Paket       |           | 2 Paket       |             | 3 Paket       |
|                                                                                   |                                                                   | 2. Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Perhubungan Udara | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana udara                                           | 52,000,000                       | 9 Paket       | 50,000,000 | 1 Paket       |           |               |           |               | 102,000,000 |               |
|                                                                                   |                                                                   |                                                                           | Tahapan Kontruksi Pembangunan Dry Port                                                  |                                  |               |            |               |           |               |           |               |             |               |
|                                                                                   |                                                                   | 3. Pengadaan dan pemasangan alat Sistem Radio Komunikasi Perhubungan      | Jumlah penyediaan alat komunikasi dan radio komunikasi antar daerah di Provinsi Lampung | 125,000                          | 1 Paket       | 125,000    | 1 Paket       | 125,000   | 1 Paket       | 150,000   | 1 Paket       | 175,000     | 1 Paket       |
| <b>4. Persentase meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</b> | <b>4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b> | 1. Perencanaan program prasarana dan fasilitas perhubungan                |                                                                                         | 1,354,000                        | 3 Dokum<br>en | 800,000    | 3 Dokum<br>en | 1,000,000 | 3 Dokum<br>en | 3,000,000 | 3 Dokum<br>en | 3,000,000   | 3 Dokum<br>en |
|                                                                                   |                                                                   | 2. Perencanaan teknis prasarana dan fasilitas perkeretaapian              | Jumlah Dokumen                                                                          | 1,350,000                        | 2 Dokum<br>en | 2,100,000  | 3 Dokum<br>en | 1,750,000 | 2 Dokum<br>en | 1,150,000 | 2 Dokum<br>en | 500,000     | 1 Dokum<br>en |
|                                                                                   |                                                                   | 3. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut       | Jumlah Dokumen                                                                          | 1,150,000                        | 3 Dokum<br>en | 800,000    | 2 Dokum<br>en | 800,000   | 2 Dokum<br>en | 800,000   | 2 Dokum<br>en | 800,000     | 2 Dokum<br>en |
|                                                                                   |                                                                   | 4. Perencanaan Teknis Bandara                                             | Jumlah Dokumen                                                                          | 1,500,000                        | 3 Dokum<br>en | 450,000    | 1 Dokum<br>en | 950,000   |               | 950,000   |               | 950,000     |               |
|                                                                                   |                                                                   | 5. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat      | Jumlah Dokumen                                                                          | 750,000                          | 3 Dokum<br>en | 1,500,000  | 2 dokume<br>n | 1,500,000 | 2 dokume<br>n | 1,500,000 | 2 dokum<br>en | 1,500,000   | 2 dokume<br>n |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat  
Indikator Sasaran : Persentase Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas

| Indikator Kinerja                                                         | Program Prioritas                                         | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                    | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |                              |           |               |           |               |           |               |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|                                                                           |                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                      | 2015                             |                              | 2016      |               | 2017      |               | 2018      |               | 2019      |               |
|                                                                           |                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                      | Pagu                             | Kinerj<br>a                  | Pagu      | Kinerj<br>a   | Pagu      | Kinerj<br>a   | Pagu      | Kinerj<br>a   | Pagu      | Kinerj<br>a   |
| <b>1. Persentase Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b> | <b>1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b> | 1. Pengaturan Lalu Lintas pada event-event tertentu di Provinsi Lampung                           | Prosentase bulan pengaturan lalu lintas untuk tamu-tamu negara, dan petugas PAM lalin di daerah rawan macet dengan lancar dan tertib | 165,000                          | 12 bulan                     | 165,000   | 12 Bulan      | 165,000   | 12 Bulan      | 165,000   | 12 Bulan      | 165,000   | 12 Bulan      |
|                                                                           |                                                           | 2. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta Pengendalian Angkutan Haji        | Jumlah Kegiatan Pengendalian Angkutan orang dan barang                                                                               | 750,000                          | 4 Kegiatan                   | 750,000   | 4 Kegiatan    | 800,000   | 4 Kegiatan    | 800,000   | 4 Kegiatan    | 800,000   | 4 Kegiatan    |
|                                                                           |                                                           |                                                                                                   | 1. Operasional Petugas Angkutan Lebaran                                                                                              |                                  |                              |           |               |           |               |           |               |           |               |
|                                                                           |                                                           |                                                                                                   | 2. Operasional Petugas Angkutan Haji                                                                                                 |                                  |                              |           |               |           |               |           |               |           |               |
|                                                                           |                                                           |                                                                                                   | 3. Operasional Petugas Angkutan Natal                                                                                                |                                  |                              |           |               |           |               |           |               |           |               |
|                                                                           |                                                           |                                                                                                   | 4. Operasional Petugas Tahun Baru                                                                                                    |                                  |                              |           |               |           |               |           |               |           |               |
|                                                                           |                                                           | 3. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas              | Jumlah Kelengkapan Fasilitas Keselamatan di jalan provinsi                                                                           | 1,473,000                        | 172 buah rambu lalin standar | 1,500,000 | 800 Fasilitas | 1,500,000 | 800 Fasilitas | 1,500,000 | 800 Fasilitas | 1,500,000 | 800 Fasilitas |
|                                                                           |                                                           | 4. Penyelenggaraan Operasional Unit Penelitian Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan SAR Daerah | Prosentase bulan operasional Satgas UPK, SAR Daerah dan Flying Gang                                                                  | 175,000                          | 12 Bulan                     | 100,000   | 12 Bulan      | 100,000   | 12 Bulan      | 100,000   | 12 Bulan      | 100,000   | 12 Bulan      |
|                                                                           |                                                           | 5. forum Koordinasi lintas Sektor Perhubungan                                                     | Jumlah koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan (50jta)                    | 50,000                           | 1 Kegiatan                   | 75,000    | 1 Kegiatan    | 100,000   | 1 Kegiatan    | 425,000   | 3 Kegiatan    | 500,000   | 3 Kegiatan    |
|                                                                           |                                                           |                                                                                                   | Forum LLAJ                                                                                                                           | 50,000                           | 1 Kegiatan                   | 75,000    | 1 Kegiatan    | 100,000   | 1 Kegiatan    | 125,000   | 1 Kegiatan    | 150,000   | 1 Kegiatan    |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat  
 Indikator Sasaran : Persentase Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas

| Indikator Kinerja                                                                                     | Program Prioritas                                                                     | Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |                  |         |                  |         |                  |         |                   |         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
|                                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                                                                                                              | 2015                             |                  | 2016    |                  | 2017    |                  | 2018    |                   | 2019    |                   |
|                                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                                                                                                              | Pagu                             | Kinerj<br>a      | Pagu    | Kinerj<br>a      | Pagu    | Kinerj<br>a      | Pagu    | Kinerj<br>a       | Pagu    | Kinerj<br>a       |
|                                                                                                       |                                                                                       |                                                                              | Forum Kepelabuhan                                                                                            |                                  |                  |         |                  |         |                  | 150,000 | 1<br>Kegiata<br>n | 150,000 | 1<br>Kegiata<br>n |
|                                                                                                       |                                                                                       |                                                                              | Forum Perkeretaapian                                                                                         |                                  |                  |         |                  |         |                  | 200,000 | 1<br>Kegiata<br>n | 200,000 | 1<br>Kegiata<br>n |
|                                                                                                       |                                                                                       | 6. Pembinaan dan Peningkatan keselamatan transportasi                        | Jumlah peningkatan keselamatan transportasi                                                                  |                                  |                  |         |                  |         |                  | 150,000 | 1<br>Kegiata<br>n | 200,000 | 1<br>Kegiata<br>n |
|                                                                                                       |                                                                                       | 7. Audit dan inspeksi Keselamatan Transportasi                               | Jumlahaudit dan inspeksi transportasi                                                                        |                                  |                  |         |                  |         |                  | 150,000 | 1<br>Kegiata<br>n | 200,000 | 1<br>Kegiata<br>n |
| <b>2. Persentase Meningkatnya pengembangan pos dan telekomunikasi serta meteorologi dan geofisika</b> | <b>2. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika</b> | 1. Pembuatan dan Distribusi Bulletin Cuaca serta Informasi Perhubungan Udara | Jumlah dokumen data prakiraan cuaca dan iklim guna mendukung kelancaran transportasi dan sektor lain terkait | 150,000                          | 1<br>Dokum<br>en | 150,000 | 1<br>Dokum<br>en | 150,000 | 1<br>Dokum<br>en | 150,000 | 1<br>Dokum<br>en  | 150,000 | 1<br>Dokum<br>en  |
| <b>3. Persentase Meningkatnya antisipasi dan pengendalian keadaan keadaan rescue</b>                  | <b>3. Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue*</b>                         | 1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SAR Daerah                    | Jumlah peralatan SAR Daerah untuk Penanganan Bencana                                                         | 150,000                          | 3 Paket          | 150,000 | 2<br>Paket       | 150,000 | 2<br>Paket       | 350,000 | 3<br>Paket        | 400,000 | 3<br>Paket        |
|                                                                                                       |                                                                                       | 2. Pengadaan Peralatan Pendukung Penanganan Kecelakaan KA                    | Jumlah peralatan pendukung penanganan kecelakaan KA (Flying gang)                                            | 100,000                          | 1 Paket          | 100,000 | 1<br>Paket       | 100,000 | 1<br>Paket       | 116,100 | 1<br>Paket        | 225,797 | 1<br>Paket        |
| <b>4. Persentase Terlaksananya peningkatan pendidikan dan pelatihan</b>                               | <b>4. Program Pendidikan Non Formal</b>                                               | 1. Pendidikan dan Pelatihan Potensi SAR Daerah                               | Jumlah pessenger pelatihan SAR                                                                               | 175,000                          | 40<br>orang      | 175,000 | 40<br>orang      | 175,000 | 40<br>orang      | 175,000 | 40<br>orang       | 175,000 | 40<br>orang       |
|                                                                                                       |                                                                                       | 2. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Lampung                      | Jumlah peserta pelajar pelopor                                                                               | 125,000                          | 200<br>orang     | 150,000 | 200<br>orang     | 150,000 | 200<br>orang     | 150,000 | 200<br>orang      | 150,000 | 200<br>orang      |

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

Indikator Sasaran : Persentase Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas

| Indikator Kinerja | Program Prioritas | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      | Pagu Indikatif (x 1000 )/Kinerja |             |         |             |         |             |         |             |         |             |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                   |                   |                                                                                      |                                                                                        | 2015                             |             | 2016    |             | 2017    |             | 2018    |             | 2019    |             |
|                   |                   |                                                                                      |                                                                                        | Pagu                             | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     | Pagu    | Kinerja     |
|                   |                   | 3. Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Lampung    | Jumlah peserta AKUT                                                                    | 100,000                          | 40 orang    | 100,000 | 40 orang    | 100,000 | 40 orang    | 100,000 | 40 orang    | 100,000 | 40 orang    |
|                   |                   | 4. Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Nasional | Jumlah Kab/kota peserta lomba WTN                                                      | 75,000                           | 15 Kab/Kota | 75,000  | 15 Kab/Kota | 100,000 | 15 Kab/Kota | 100,000 | 15 Kab/Kota | 150,000 | 15 Kab/Kota |
|                   |                   | 5. Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Lampung                         | Jumlah kegiatan Keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor | 250,000                          | 1 kegiatan  | 250,000 | 1 kegiatan  | 250,000 | 1 kegiatan  | 250,000 | 1 kegiatan  | 250,000 | 1 kegiatan  |
|                   |                   | 6. Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan KA                                           | Jumlah Pendidikan dan pelatihan keselamatan KA                                         | 250,000                          | 2 kegiatan  | 250,000 | 2 kegiatan  | 250,000 | 2 kegiatan  | 250,000 | 2 kegiatan  | 250,000 | 2 kegiatan  |

# Bab 3

## **Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

### **3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Dalam kegiatan pembangunan daerah, sektor perhubungan mempunyai peranan untuk mendorong proses pembangunan dan aktivitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehari-hari. Sektor perhubungan ini terkait erat dengan hampir seluruh sektor pembangunan.

Sesuai dengan sistem pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 dan peraturan perundangan lain yang terkait, maka pengelolaan bidang perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota. Di satu sisi, pembagian kewenangan ini akan mengurangi beban kerja, karena terdistribusi pada masing-masing tingkat pemerintahan, namun di sisi lain menyebabkan kesulitan pada aspek koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pembangunan, terutama karena masih besarnya egoisme masing-masing pemerintah dan lembaga. Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintahan harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintah, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Mengingat besarnya peranan pihak masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sektor transportasi, maka peranan pemerintah akan lebih banyak pada aspek fasilitator dan regulator. Dengan demikian aspek peraturan perundangan, penegakan hukum dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Armada angkutan jalan, ASDP, laut dan udara

sebagian besar disediakan dan dioperasikan oleh pihak masyarakat dan swasta.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta agar mampu dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Beberapa situasi dan kondisi yang terjadi sehingga menyebabkan perlunya dilakukan revisi atas RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 2019-2024 antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua prioritas pembangunan dimana saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan *refocussing* anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak.
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berimplikasi pada berubahnya nomenklatur Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, sebagai instrumen untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Saat ini dokumen RPJMD Provinsi Lampung masih disusun dengan mengacu pada Nomenklatur Program sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang



mengharuskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga APBD Tahun anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam penjelasan/lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, yang diimplementasikan melalui aplikasi e-planning dan e-budgetting.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, meliputi:

a. Sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan. Hal ini tidak terlepas dari kurang optimalnya aspek pengendalian dan standar yang ditetapkan. Kondisi ini juga diperparah dengan standar tarif angkutan umum yang rendah dan tidak ada subsidi pemerintah, sehingga pihak pengusaha angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang rendah;
- Masih rendahnya peranan angkutan umum dalam memberikan pelayanan menyebabkan kendaraan pribadi masih sangat dominan;
- Belum terintegrasinya antar dan intermoda Transportasi;
- Masih tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh tidak disiplinnya berlalu lintas di jalan (Ditunjukan semakin meningkatnya data Santunan/Klaim Jasa Raharja);

- Masih tingginya tingkat pelanggaran Over Dimensi dan Over Loading (ODOL), khususnya masih tingginya tingkat kerusakan jalan disebabkan muatan lebih angkutan barang Batubara;
- Kebutuhan pengembangan dan peningkatan pelayanan di Terminal type A Rajabasa;
- Pengoperasian Terminal penumpang Type B masih terkendala terkait dengan ketersediaan SDM dan Fasilitas Terminal belum teralokasi di setiap Kab/Kota;
- Belum optimalnya penataan AKDP/AJDP, Aglomerasi maupun angkutan sewa khusus dan Ojek online (angkutan berbasis aplikasi).
- Masih rendahnya pelayanan aksesibilitas dan prasarana pendukung ke beberapa destinasi wisata di Provinsi Lampung.

b. Sektor Perkeretaapian

- Masih rendahnya peranan Kereta Api dalam pelayanan angkutan umum massal, khususnya angkutan umum massal perkotaan (*mass urban public transport*);
- Belum tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Perkereta Apian;
- Angkutan KA. BABARANJANG yang masih melintasi jaringan rel dalam kota masih menjadi masalah utama penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung, sementara target produksi kebutuhan akan meningkat dari 20 juta ton menjadi 45 juta ton/tahun;
- Kebutuhan mendesak pembangunan Shortcut Tegineneng –Km.3-Tarahan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlintasan sebidang dalam kota;
- Kebutuhan Kereta Commuter Bandara dan Kereta Khusus Bandara untuk kebutuhan Aksesibilitas pelayanan angkutan Bandara
- Kebutuhan pengembangan jaringan Kereta Api Bandar Lampung-Bakauheni (sejajar dengan jalan tol)
- Masih tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang Kereta api yang tidak berpalang pintu;
- Kebutuhan *Dryport* Way Kanan untuk mendukung Pelabuhan Panjang.

c. Sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

- Belum ada kajian teknis / *Blue Print* / Mater Plan tentang Pengembangan potensi Angkutan Sungai dan Danau yang ada di Provinsi Lampung;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau di Provinsi Lampung;
- Belum tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang ASDP;
- Belum Terinventarisasi data kapal rakyat yang melayani angkutan sungai antar Kabupaten di Provinsi Lampung;
- Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas dalam pembangunan jaringan transportasi ASDP antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Kebutuhan penambahan Dermaga di pelabuhan Bakauheni –Merak untuk peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni.

d. Sektor Angkutan Laut

- Kebutuhan pengembangan pelabuhan Regional sebagai Implentasi pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014;
- Belum tersedianya SDM yang memiliki Kompetensi dalam bidang Laut;
- Masih rendahnya pelayanan angkutan perintis Laut antar pulau di Provinsi Lampung;
- Kebutuhan pengoperasian pelabuhan rakyat Sebalang sebagai solusi pemindahan kapal rakyat dari Pelabuhan Internasional Panjang (mendukung ISPS Code);
- Kebutuhan Pelabuhan di Sungai Mesuji untuk mendukung Program Prioritas Gubernur Lampung terkait dengan Kerjasama perdagangan logistic Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung;
- Kebutuhan jaringan rute angkutan pelayanan rakyat di Provinsi Lampung.

e. Sektor Angkutan Udara

- Usulan pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung sering terhambat dikarenakan Master Plan Bandara yang masih menunggu pengesahan dari Menteri Perhubungan RI;
- Masih kurangnya fasilitas pendukung khususnya peralatan keamanan penerbangan di Bandara Gatot Subroto Kab. Way Kanan yang sudah di operasionalkan sebagai Bandara sipil (pelayanan perintis angkutan udara);

- Perlunya pengembangan Bandara M.Taufiq Kiemas untuk mendukung destinasi wisata Bahari di Kab. Pesisir Barat;
- Perlunya dukungan Daerah terhadap kawasan keselamatan operasional penerbangan di Bandara-bandara di Provinsi Lampung termasuk regulasi peraturan Daerah pendukung KKOP;
- Perlunya dukungan Pemerintah Daerah terhadap kelangsungan pelayanan angkutan udara regional di Provinsi Lampung;
- Bandara-bandara perintis yang ada belum dimanfaatkan secara optimal;
- Kapasitas bandara Radin Inten II Lampung saat ini telah melampaui kapasitas yang direncanakan sehingga saat ini pelayanan bandara Radin Inten II pada waktu puncak / terjadi *delay* beberapa penerbangan, ruang tunggu bandara mengalami over kapasitas.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubenur**

Visi pembangunan Gubernur Lampung adalah sebagai berikut :

#### **"Rakyat Lampung Berjaya"**

Visi dari Gubernur Lampung 2019-2024 dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya harus dilakukan dengan melakukan pelayanan prima jasa pehubungan yang berdaya saing, efektif dan efisien, ramah lingkungan, mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah serta mampu menghadapi era globalisasi. Hal ini sejalan dengan dimana pergerakan kondisi perekonomian harus tergambar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan didukung sistem transportasi yang efektif dan efisien, berbiaya rendah sehingga mengurangi biaya produksi suatu barang. Selain itu terjaganya kelestarian dan lingkungan hidup ini harus dengan melakukan pelayanan prima dibidang transportasi dan integrasi antar moda transportasi, sehingga rasa aman dapat diwujudkan dan tingkat keadilan dalam pembangunan merata dan adil tanpa diskriminasi baik antara individu maupun antar wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan dapat terpenuhinya hak-hak dasarnya dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat dari seluruh kehidupan.

Kondisi ini mendukung pengertian bahwa dengan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau wilayah yang potensial serta wilayah yang lain, akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah serta mewujudkan kesejahteraan, terutama berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi. Selain efektif dan efisien, pelayanan transportasi harus dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, tepat waktu, mudah dijangkau dan ramah lingkungan.

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi arah

untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Lampung Periode 2019-2024 tersebut ditetapkan Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama..

Misi Gubernur yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah misi Gubernur yang keempat yaitu Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Jabaran misi keempat yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pehubungan Provinsi Lampung adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah dengan menyediakan infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Strategi yang ditempuh adalah pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar. Arah kebijakan yang diambil mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa.

Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan Misi ke-4, mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi, konektivitas wilayah dan system permukiman tertuang dalam Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2020-2024 di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
- b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga kereta api dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
- c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energy listrik (termasuk energy baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energy daerah serta apemerataan layanan listrik;
- d. Mendorong pengembangan system penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
- e. Mendorong pengembangan system pengelolaan sampah regional;
- f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bias melayani rumah tangga secara merata;
- g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah pedesaan;
- h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman pedesaan, kampung nelayan dan pemukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan untuk PNS dan Pekerja Swasta.

Sejalan dengan itu beberapa program yang terkait dengan fungsi dan tugas dinas perhubungan adalah:

- a. Melaksanakan tahap-tahap pembangunan jalur double track KA;
- b. Mengembangkan sistem (moda) transportasi yang menghubungkan antar wilayah/kab/kota;

- c. Meningkatkan pembangunan simpul transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Provinsi Lampung;
- d. Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalu lintas serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

### **3.3 Telaahan RPJMD Provinsi**

Pengembangan infrastruktur dalam RPJMD disebutkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); pengembangan Bandara (Radin Intan II, Bandara M. taufiq Kiemas, Gatot Subroto dan Astra Kestra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui, Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api.

Terkait dengan tugas dan fungsi dinas perhubungan, dalam RPJMD disebutkan permasalahan dinas perhubungan adalah:

- a. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perhubungan
- b. Tingkat kemacetan yang mulai mengkhawatirkan
- c. Rendahnya fasilitas keselamatan lalu lintas
- d. Minimnya layanan sektor perhubungan
- e. Lambatnya penanganan infrastruktur perhubungan kewenangan Pusat di Provinsi Lampung

Didalam Matriks RPJMD Provinsi Lampung disebutkan program pembangunan yang merupakan urusan dan bagian tugas Dinas Perhubungan, yaitu Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi. Sasarannya adalah Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional. Hal ini akan dicapai dengan



pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten / kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar. Arah kebijakannya adalah untuk mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa. Keluaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) untuk meningkatnya kualitas pengelolaan pembangunan, perencanaan teknis dan prioritas pembangunan perhubungan dan terciptanya kondisi prasarana dan fasilitas LLAJ yang sesuai dengan persyaratan teknis dan tersedianya sistem informasi manajemen di bidang perhubungan.
- PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN untuk menyelesaikan permasalahan jalur dan alur pelayaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
- PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pengembangan perkeretaapian di Provinsi Lampung.

Sedangkan terkait dengan misi ke lima adalah menegakan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif, maka sasarannya adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Strateginya dengan pengembangan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance, dengan arah kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Keluaran dari jabaran misi kelima diatas adalah:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi sehingga terpenuhi dan tersedia sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik.

### **3.4 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Dalam renstra kementerian perhubungan 2020-2024 disebutkan apa yang menjadi amanat Undang-Undang No.17/2007 (RPJPN) tentang sektor transportasi yaitu terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi.

Defisit infrastruktur transportasi di semua lini dan kesenjangan transportasi antar daerah menjadi beban masa lalu yang harus diemban oleh RENSTRA 2019-2024. RENSTRA juga harus mengurus masalah *bottlenecking* dan *gridlock* yang terus meluas dibanyak tempat di jalur-jalur utama dan diperkotaan. Misi besar untuk terpenuhinya ketersediaan infrastruktur transportasi, didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha. Selain itu juga diamanatkan agar ketersediaan infrastruktur tersebut sesuai dengan rencana tata ruang nasional ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. Misi besar ini menjadi beban berat bagi RPJMN III dan RENSTRA kementerian perhubungan oleh karena beban pembangunan masa lalu yang harus diselesaikan dan beban pembangunan kedepan yang berakumulasi untuk mencapai hasil – hasil pembangunan seperti diamanatkan oleh RPJPN.

Sejalan dengan renstra kementerian perhubungan dominasi jalan sebagai prasarana dan sarana transportasi sehingga harus ada *share* beban ke jaringan kereta api. Transportasi juga harus mampu menciptakan aksesibilitas dan konektivitas disemua lini wilayah. Ini semua memberi indikasi kuat bagi terbangunnya sistem dan jaringan transportasi yang lebih luas menjangkau seluruh wilayah negeri, membuka akses dan dan menciptakan konektivitas nasional. Transportasi seharusnya mempunyai peran lebih strategis untuk upaya besar ini karena sifatnya yang dapat memicu perekonomian lokal dan membuka akses dan pasar ekonomi lokal.

Terkait Renstra Kementerian Perhubungan, Struktur RENSTRA 2020-2024 mengenai Kebijakan Nasional Sektor Transportasi, meliputi:

1. membangun konektivitas nasional

Kebijakan strategis yang diambil adalah transportasi multimoda, sistem logistik nasional, percepatan pembangunan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan, membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, industri, dan pusat-pusat pertumbuhan, mendorong pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan negara. Program strategisnya KA barang luar Jawa; short sea shipping; angkutan umum perkotaan; transportasi KTI; daerah tertinggal, perbatasan, dan kawasan perdesaan; modernisasi angkutan serta keperintisan *ASEAN connectivity*

2. membangun pasar dan industri transportasi nasional

Kebijakan strategis yang diambil adalah revitalisasi kelembagaan KPS; revisi Perpres dan Peraturan Menteri terkait dengan KPS; tarif dan pembiayaan serta transportasi modern; pemisahan fungsi regulator dan operator; meningkatkan peran pemerintah pusat dalam kereta api perkotaan. Program strategisnya adalah *value for money & life-cycle costing*, fungsi dan peran BUMN kedepan, sinkronisasi kelembagaan KPS, mengurangi praktek monopoli serta mainstreaming KPS dalam APBN

3. mengintegrasikan isu-isu lintas sektor dan sektor.

Kebijakan strategis yang diambil adalah efektivitas kerangka hukum dan peraturan transportasi, hemat energi, dampak sosial budaya dari transportasi, pendidikan dini untuk kepedulian transportasi publik. Program strategisnya adalah melaksanakan RUNK dan mengurangi kecelakaan transportasi, riset dan teknologi transportasi, kualitas dan kapasitas SDM, manajemen sistem transportasi berbasis teknologi

Beban Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 adalah membentang benang merah dari hulu ke hilir, menjaga konsistensi substansi dari kebijakan, program, dan kegiatan strategis sektor transportasi. RENSTRA juga harus memuat 2 hal besar: (i) program dan kegiatan berkesinambungan dari RENSTRA sebelumnya yang tertunda atau belum selesai; (ii) program dan kegiatan strategis yang menggambarkan non linieritas dari RENSTRA 2020-2024.

Arah kebijakan dan rencana pengembangan perkeretaapian nasional dijabarkan program pengembangan jaringan dan layanan tahun 2020-2024, seperti:

- Pengembangan jaringan dan layanan KA antara kota, diantaranya Km3-Bakauheni, Banko Tengah-Srengsem, Shortcut Rejosari-Tarahan
- Pengembangan jaringan dan layanan KA perkotaan: Bandar Lampung

Dalam cetak biru Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda dijabarkan rencana pengembangan tahun 2020-2024 disebutkan Pengembangan/pemantapan akses jalan/jalan rel ke beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Panjang Lampung.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari telaahan semua kebijakan diatas, yaitu: visi, misi dan progam Gubernur; RPJMD Provinsi Lampung; serta Draft Renstra Kementerian Perhubungan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan an, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis, keselamatan dan keamanan prasarana dan sarana transportasi untuk semua moda baik operasionalnya maupun ditinjau dari sisi simpul transortasi (bandara, terminal, stasiun KA, pelabuhan) belum terpenuhi
2. Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan
3. Pembangunan kereta api masih terbatas.
4. Masih tinggi tingkat over loading angkutan barang
5. Keberadaan bandar udara belum memadai untuk menampung perkembangan jumlah penumpang dan barang
6. Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua
7. Kurang berimbangya komposisi moda dalam bidang transportasi
8. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan
9. Jaringan Transportasi Udara yang belum optimal



# Bab 4

## Tujuan dan Sasaran

### 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Tujuan merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan guna mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis, permasalahan pembangunan di daerah dalam kurun waktu lima tahunan.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yaitu "Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang menjadi wewenang Provinsi", dengan indikator sasaran 1. Rasio Konektivitas Provinsi, 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi, 3. Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis. Tujuan dimaksud untuk mendukung visi dan misi Gubernur Lampung tahun 2020 – 2024, dimana Visi Gubernur Lampung yaitu : " Rakyat Lampung Berjaya " dan mendukung Misi ke-4 khususnya untuk Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yaitu: " Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah."

Berikut adalah pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang tertuang dalam bentuk tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1  
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah

| No. | Tujuan                                                                  | Indikator Tujuan   | Sasaran                                        | Indikator sasaran                              | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                         |                    |                                                |                                                | (5)                                         | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| (1) | (2)                                                                     |                    | (3)                                            | (4)                                            |                                             | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1.  | Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang menjadi wewenang Provinsi. | Rasio Konektivitas | 1. Terwujudnya Konektivitas Provinsi           | 1. Rasio Konektivitas Provinsi.                |                                             | 0,69% | 0,70% | 0,72% | 0,73% |
|     |                                                                         |                    | 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan |                                             | 83%   | 84%   | 45%   | 86%   |

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                                  | Indikator sasaran                                                                         | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |      |      |      |      |
|-----|--------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
|     |        |                  |                                          |                                                                                           | (5)                                         | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| (1) | (2)    |                  | (3)                                      | (4)                                                                                       |                                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|     |        |                  |                                          | Publik Sektor Transportasi                                                                |                                             |      |      |      |      |
|     |        |                  | 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi | 3. Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis | 29%                                         | 30%  | 35%  | 40%  | 45%  |

# Bab 5

## Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1  
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

| Visi : Rakyat Lampung Berjaya                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah                 |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| Tujuan                                                                                                            | Sasaran                                 | Strategi                                                                                                                                                                                               | Arah Kebijakan                                                                                                                                                         |
| Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya). | Meningkatnya konektivitas antar wilayah | Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar. | Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut dan perkeretaapian) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa. |



# Bab 6

## **Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan**

Program merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan, dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Hal ini terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output), dimana penyusunan program kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran. Ini sekaligus merupakan gambaran suatu komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 2021-2024. Langkah-langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2021-2024. Keterkaitan antara kebijakan dengan program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Kebijakan dan Program

| No | Kebijakan                                                                                                                                                     | Program                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.                    |
|    |                                                                                                                                                               | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). |
|    |                                                                                                                                                               | Program Pengelolaan Pelayaran                                  |
|    |                                                                                                                                                               | Program Pengelolaan Perkeretaapian                             |

## 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri **No.90 tahun 2019**, tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                   |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                      |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |
| <b>Sub Kegiatan:</b>                                                                  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD                                          |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                      |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |
| <b>Sub Kegiatan:</b>                                                                  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| <b>Kegiatan:</b>                                                              |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 |
| Sub Kegiatan:                                                                 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |
| <b>Kegiatan:</b>                                                              |
| <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             |
| Sub Kegiatan:                                                                 |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                        |
| <b>Kegiatan:</b>                                                              |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                       |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      |
| Penyediaan Bahan/Material                                                     |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD        |
| <b>Kegiatan:</b>                                                              |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan:                                                                                                      |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |
| Pengadaan Mebel                                                                                                    |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |
| Sub Kegiatan:                                                                                                      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                               |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                   |
| <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>                                                              |
| Sub Kegiatan:                                                                                                      |
| Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                        |
| Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                           |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                   |
| <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>                                                             |
| Sub Kegiatan:                                                                                                      |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                    |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                   |
|                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                         |
| <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>                                                                                                             |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                            |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                   |
| Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B                                                                                                      |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                         |
| <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>                                                                      |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                            |
| Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                |
| Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                     |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                       |
| Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                       |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                         |
| <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                                                      |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                            |
| Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                  |
| Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                      |
| Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                         |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                         |
| <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                      |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                            |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                             |
| Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                      |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                         |
| <b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                         |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Facilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik                                                                                                |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Penertiban Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas</b>                                     |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan<br>Penyewaan peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                                                                                                                                         |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pembangunan Pelabuhan pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Penertiban Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                                                                                                                                                               |
| Sub Kegiatan :                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                    |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi</b>                                                                                                                                                                                         |
| Sub Kegiatan:                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

### 6.3 Indikator Kinerja

Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka indikator kinerja untuk setiap program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program

| No | Rencana Program                                               | Indikator Kinerja                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                  | Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan         |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Persentase pengelolaan pelayaran                                  |
| 4. | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                            | Persentase pengelolaan perkeretaapian                             |

Format Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat secara rinci pada Matrik Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagaimana terlampir pada halaman lampiran.

Tabel 6.4 Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                             | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |            |           |            |           |            |           |            |                                          |            |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------------------|------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                               |                      | 2021                                                    |            | 2022      |            | 2023      |            | 2024      |            | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |            |
|    |                                                                  |                                                                                                                                               |                      | TARGET                                                  | RP         | TARGET    | RP         | TARGET    | RP         | TARGET    | RP         | TARGET                                   | RP         |
| 1  | 2                                                                | 3                                                                                                                                             | 4                    | 7                                                       | 8          | 9         | 10         | 11        | 12         | 13        | 14         | 15                                       | 16         |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                     | Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah                                                                             | 80%                  | 100%                                                    | 18,159,286 | 100%      | 18,112,601 | 100%      | 18,826,450 | 100%      | 19,276,450 | 100%                                     | 74,374,787 |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelayanan perkantoran yang dilaksanakan                                                                                            | 80%                  | 100%                                                    | 1,085,868  | 100%      | 349,183    | 100%      | 1,065,000  | 100%      | 1,065,000  | 100%                                     | 3,565,051  |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Dokumen Renstra, IKU, Renja, RKA, PK, RKT, ROK, TOR, IKM) | 80%                  | 9 Dokumen                                               | 1,000,868  | 9 Dokumen | 284,183    | 9 Dokumen | 1,000,000  | 9 Dokumen | 1,000,000  | 36 Dokumen                               | 3,285,051  |



| No | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                           | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                                             |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                |                            | 2021                                                    |                   | 2022         |                   | 2023         |                   | 2024         |                   | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PERIODE RPJMD |                   |
|    |                                                                                       |                                                                                                |                            | TARGET                                                  | RP                | TARGET       | RP                | TARGET       | RP                | TARGET       | RP                | TARGET                                      | RP                |
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                                              | 4                          | 7                                                       | 8                 | 9            | 10                | 11           | 12                | 13           | 14                | 15                                          | 16                |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD                                                                        | 80%                        | 1 Dokumen                                               | 10,000            |              |                   |              |                   |              |                   | 1 Dokumen                                   | 10,000            |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                              | 80%                        | 1 Dokumen                                               | 10,000            |              |                   |              |                   |              |                   | 1 Dokumen                                   | 10,000            |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LKj, LKPJ, LPPD                                                                 |                            | 3 Dokumen                                               | 30,000            | 3 Dokumen    | 30,000            | 3 Dokumen    | 30,000            | 3 Dokumen    | 30,000            | 12 Dokumen                                  | 120,000           |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah dokumen pelaporan (Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, Evaluasi Renstra, monitoring) |                            | 3 Dokumen                                               | 35,000            | 3 Dokumen    | 35,000            | 3 Dokumen    | 35,000            | 3 Dokumen    | 35,000            | 12 Dokumen                                  | 140,000           |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase tercapainya tertib administrasi keuangan perangkat daerah</b>                    |                            | <b>100%</b>                                             | <b>12,801,950</b> | <b>100 %</b> | <b>12,429,000</b> | <b>100 %</b> | <b>12,786,950</b> | <b>100 %</b> | <b>12,786,950</b> | <b>100 %</b>                                | <b>50,804,850</b> |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                        | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |            |           |            |           |            |           |            |                                          |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------------------|------------|
|    |                                                                               |                                                                                                          |                      | 2021                                                    |            | 2022      |            | 2023      |            | 2024      |            | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |            |
|    |                                                                               |                                                                                                          |                      | TARGET                                                  | RP         | TARGET    | RP         | TARGET    | RP         | TARGET    | RP         | TARGET                                   | RP         |
| 1  | 2                                                                             | 3                                                                                                        | 4                    | 7                                                       | 8          | 9         | 10         | 11        | 12         | 13        | 14         | 15                                       | 16         |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah bulan pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan                                                           |                      | 12 Bulan                                                | 12,686,950 | 12 Bulan  | 12,392,000 | 12 Bulan  | 12,686,950 | 12 Bulan  | 12,686,950 | 48 Bulan                                 | 50,452,850 |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah bulan pengelolaan anggaran kantor dan ketersediaan materai, cek dan pulsa operator                |                      | 12 Bulan                                                | 25,000     | 12 Bulan  | 25,000     | 12 Bulan  | 25,000     | 12 Bulan  | 25,000     | 48 Bulan                                 | 100,000    |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Akuntansi SKPD dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan |                      | 12 Bulan                                                | 75,000     | 12 Bulan  | 12,000     | 12 Bulan  | 75,000     | 12 Bulan  | 75,000     | 48 Bulan                                 | 237,000    |
|    | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                        | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan                                                                     |                      | 3 Dokumen                                               | 10,000     | 3 Dokumen | -          | 3 Dokumen | -          | 3 Dokumen | -          | 12 Dokumen                               | 10,000     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan                                                                          |                      | 7 Dokumen                                               | 5,000      | 7 Dokumen | -          | 7 Dokumen | -          | 7 Dokumen | -          | 28 Dokumen                               | 5,000      |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN     | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                        | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |        |           |       |           |        |           |        |                                          |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|------------------------------------------|--------|
|    |                                                                   |                                                                                             |                            | 2021                                                    |        | 2022      |       | 2023      |        | 2024      |        | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |        |
|    |                                                                   |                                                                                             |                            | TARGET                                                  | RP     | TARGET    | RP    | TARGET    | RP     | TARGET    | RP     | TARGET                                   | RP     |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                           | 4                          | 7                                                       | 8      | 9         | 10    | 11        | 12     | 13        | 14     | 15                                       | 16     |
|    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | <b>Persentase tercapainya tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> |                            | 100%                                                    | 20,000 | 100%      | 3,000 | 100%      | 10,000 | 100%      | 10,000 | 100%                                     |        |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                        |                            | 2 Dokumen                                               | 3,000  | 2 Dokumen | -     | 2 Dokumen | -      | 2 Dokumen | -      | 8 Dokumen                                | 3,000  |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah bulan penatausahaan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                          |                            | 12 Bulan                                                | 17,000 | 12 Bulan  | 3,000 | 12 Bulan  | 10,000 | 12 Bulan  | 10,000 | 48 Bulan                                 | 40,000 |
|    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                |                            | 12 Dokumen                                              | 4,000  | -         | -     | -         | -      | -         | -      | -                                        | -      |
|    | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            | Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                       |                            | 12 Dokumen                                              | 4,000  | -         | -     | -         | -      | -         | -      | 12 Dokumen                               | 4,000  |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR<br>KINERJA                                                     | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                |              |                |              |                |              |                |                                             |                  |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|
|    |                                                               |                                                                          |                            | 2021                                                    |                | 2022         |                | 2023         |                | 2024         |                | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PERIODE RPJMD |                  |
|    |                                                               |                                                                          |                            | TARGET                                                  | RP             | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET                                      | RP               |
| 1  | 2                                                             | 3                                                                        | 4                          | 7                                                       | 8              | 9            | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15                                          | 16               |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase tercapainya kapasitas sumber daya ASN yang berkualitas</b> |                            | <b>100 %</b>                                            | <b>306,000</b> | <b>100 %</b> | <b>468,000</b> | <b>100 %</b> | <b>543,000</b> | <b>100 %</b> | <b>543,000</b> | <b>100 %</b>                                | <b>1,860,000</b> |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan PTHL                                   |                            | -                                                       | -              | 175 stel     | 175,000        | 250 stel     | 250,000        | 250 stel     | 250,000        | 675 stel                                    | 675,000          |
|    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah bulan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian           |                            | 12 Bulan                                                | 5,000          | -            | -              | -            | -              | -            | -              | 12 bulan                                    | 5,000            |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian     |                            | 12 Bulan                                                | 3,000          | -            | -              | -            | -              | -            | -              | 12 Bulan                                    | 3,000            |
|    | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah bulan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai         |                            | 12 Bulan                                                | 5,000          | -            | -              | -            | -              | -            | -              | 12 Bulan                                    | 5,000            |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan   |                            | 10 Orang                                                | 143,000        | 10 Orang     | 143,000        | 10 Orang     | 143,000        | 10 Orang     | 143,000        | 40 Orang                                    | 572,000          |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN             | INDIKATOR KINERJA                                                       | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                  |              |                  |              |                  |              |                  |                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                  |                                                                         |                      | 2021                                                    |                  | 2022         |                  | 2023         |                  | 2024         |                  | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                  |
|    |                                                                  |                                                                         |                      | TARGET                                                  | RP               | TARGET       | RP               | TARGET       | RP               | TARGET       | RP               | TARGET                                   | RP               |
| 1  | 2                                                                | 3                                                                       | 4                    | 7                                                       | 8                | 9            | 10               | 11           | 12               | 13           | 14               | 15                                       | 16               |
|    |                                                                  | Tugas dan Fungsi                                                        |                      |                                                         |                  |              |                  |              |                  |              |                  |                                          |                  |
|    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Peserta Pelajar Pelopor dan AKUT                                 |                      | 50 Orang                                                | 150,000          | 50 Orang     | 150,000          | 50 Orang     | 150,000          | 50 Orang     | 150,000          | 200 Orang                                | 600,000          |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase tercapainya tertib administrasi umum perangkat daerah</b> |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>1,233,000</b> | <b>100 %</b> | <b>1,081,000</b> | <b>100 %</b> | <b>1,221,000</b> | <b>100 %</b> | <b>1,221,000</b> | <b>100 %</b>                             | <b>4,756,000</b> |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan peralatan Listrik yang di butuhkan              |                      | 12 Bulan                                                | 12,000           | 12 Bulan     | 12,000           | 12 Bulan     | 12,000           | 12 Bulan     | 12,000           | 48 Bulan                                 | 48,000           |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah bulan penyediaan peralatan Rumah Tangga yang di butuhkan         |                      | 12 Bulan                                                | 10,000           | 12 Bulan     | 10,000           | 12 Bulan     | 10,000           | 12 Bulan     | 10,000           | 48 Bulan                                 | 40,000           |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah bulan tersediannya barang cetakan dan pengadaan                  |                      | 12 Bulan                                                | 45,000           | 12 Bulan     | 45,000           | 12 Bulan     | 45,000           | 12 Bulan     | 45,000           | 48 Bulan                                 | 180,000          |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                   | INDIKATOR KINERJA                                                                   | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |           |          |         |          |           |          |           |                                          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                        |                                                                                     |                      | 2021                                                    |           | 2022     |         | 2023     |           | 2024     |           | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |           |
|    |                                                                        |                                                                                     |                      | TARGET                                                  | RP        | TARGET   | RP      | TARGET   | RP        | TARGET   | RP        | TARGET                                   | RP        |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                   | 4                    | 7                                                       | 8         | 9        | 10      | 11       | 12        | 13       | 14        | 15                                       | 16        |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan                                                |                      | 12 Bulan                                                | 5,000     | 12 Bulan | 5,000   | 12 Bulan | 5,000     | 12 Bulan | 5,000     | 48 Bulan                                 | 20,000    |
|    | Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah bulan Penyediaan ATK dan pelaksanaan Pameran Pembangunan Lampung Fair        |                      | 12 Bulan                                                | 101,000   | 12 Bulan | 61,000  | 12 Bulan | 101,000   | 12 Bulan | 101,000   | 48 Bulan                                 | 364,000   |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah bulan penyediaan jamuan bagi tamu Dinas dan makan minum rapat                |                      | 12 Bulan                                                | 48,000    | 12 Bulan | 48,000  | 12 Bulan | 48,000    | 12 Bulan | 48,000    | 48 Bulan                                 | 192,000   |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah                              |                      | 117 Kali                                                | 1,000,000 | 117 Kali | 900,000 | 117 Kali | 1,000,000 | 117 Kali | 1,000,000 | 468 Kali                                 | 3,900,000 |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                      | 12 Bulan                                                | 3,000     | -        | -       | -        | -         | -        | -         | 12 Bulan                                 | 3,000     |
|    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah bulan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                      | 12 Bulan                                                | 9,000     | -        | -       | -        | -         | -        | -         | 12 Bulan                                 | 9,000     |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                    | INDIKATOR KINERJA                                                                  | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                |              |                  |              |                |              |                  |                                          |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                         |                                                                                    |                      | 2021                                                    |                | 2022         |                  | 2023         |                | 2024         |                  | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                  |
|    |                                                                         |                                                                                    |                      | TARGET                                                  | RP             | TARGET       | RP               | TARGET       | RP             | TARGET       | RP               | TARGET                                   | RP               |
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                  | 4                    | 7                                                       | 8              | 9            | 10               | 11           | 12             | 13           | 14               | 15                                       | 16               |
|    |                                                                         | Elektronik pada SKPD                                                               |                      |                                                         |                |              |                  |              |                |              |                  |                                          |                  |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b> |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>187,968</b> | <b>100 %</b> | <b>1,082,968</b> | <b>100 %</b> | <b>680,000</b> | <b>100 %</b> | <b>1,130,000</b> | <b>100 %</b>                             | <b>3,080,936</b> |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   |                      | -                                                       | -              | 1 Unit       | 1,000,000        | 1 Unit       | 500,000        | 1 Unit       | 800,000          | 3 Unit                                   | 2,300,000        |
|    | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Pengadaan Mebel                                                             |                      | 2 Unit                                                  | 10,000         | 2 Unit       | 10,000           | 2 Unit       | 30,000         | 2 Unit       | 30,000           | 8 Unit                                   | 80,000           |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       |                      | 2 Unit                                                  | 140,000        | 2 Unit       | 50,000           | 2 Unit       | 100,000        | 2 Unit       | 250,000          | 8 Unit                                   | 540,000          |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor                  | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung                                    |                      | 1 Unit                                                  | 37,968         | 1 Unit       | 22,968           | 1 Unit       | 50,000         | 1 Unit       | 50,000           | 4 Unit                                   | 160,936          |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN        | INDIKATOR KINERJA                                                       | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                  |              |                  |              |                  |              |                  |                                          |                  |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|    |                                                             |                                                                         |                      | 2021                                                    |                  | 2022         |                  | 2023         |                  | 2024         |                  | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                  |
|    |                                                             |                                                                         |                      | TARGET                                                  | RP               | TARGET       | RP               | TARGET       | RP               | TARGET       | RP               | TARGET                                   | RP               |
| 1  | 2                                                           | 3                                                                       | 4                    | 7                                                       | 8                | 9            | 10               | 11           | 12               | 13           | 14               | 15                                       | 16               |
|    | atau Bangunan Lainnya                                       | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     |                      |                                                         |                  |              |                  |              |                  |              |                  |                                          |                  |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b> |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>1,970,500</b> | <b>100 %</b> | <b>2,149,450</b> | <b>100 %</b> | <b>1,970,500</b> | <b>100 %</b> | <b>1,970,500</b> | <b>100 %</b>                             | <b>8,060,950</b> |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                      | 12 bulan                                                | 12,000           | 12 bulan     | 12,000           | 12 bulan     | 12,000           | 12 bulan     | 12,000           | 48 Bulan                                 | 48,000           |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                      | 12 bulan                                                | 300,000          | 12 bulan     | 300,000          | 12 bulan     | 300,000          | 12 bulan     | 300,000          | 48 Bulan                                 | 1,200,000        |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Jumlah jasa pelayanan dan keamanan kantor/ kapal                        |                      | 79 Orang                                                | 1,658,500        | 79 Orang     | 1,837,450        | 79 Orang     | 1,658,500        | 79 Orang     | 1,658,500        | 316 Orang                                | 6,812,950        |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>    | <b>Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang</b>          |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>550,000</b>   | <b>100 %</b> | <b>550,000</b>   | <b>100 %</b> | <b>550,000</b>   | <b>100 %</b> | <b>550,000</b>   | <b>100 %</b>                             | <b>2,200,000</b> |



| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                           | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |         |          |         |          |         |          |         |                                          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                    |                                                                             |                      | 2021                                                    |         | 2022     |         | 2023     |         | 2024     |         | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |           |
|    |                                                                                                                    |                                                                             |                      | TARGET                                                  | RP      | TARGET   | RP      | TARGET   | RP      | TARGET   | RP      | TARGET                                   | RP        |
| 1  | 2                                                                                                                  | 3                                                                           | 4                    | 7                                                       | 8       | 9        | 10      | 11       | 12      | 13       | 14      | 15                                       | 16        |
|    | Pemerintahan Daerah                                                                                                | urusan pemerintahan                                                         |                      |                                                         |         |          |         |          |         |          |         |                                          |           |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara                             |                      | 2 Unit                                                  | 90,000  | 2 Unit   | 90,000  | 2 Unit   | 90,000  | 2 Unit   | 90,000  | 8 Unit                                   | 360,000   |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Kapal Bantuan 35 GT yang terpelihara |                      | 11 Unit                                                 | 380,000 | 11 Unit  | 380,000 | 11 Unit  | 380,000 | 11 Unit  | 380,000 | 44 Unit                                  | 1,520,000 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                      | 12 Bulan                                                | 25,000  | 12 Bulan | 25,000  | 12 Bulan | 25,000  | 12 Bulan | 25,000  | 48 Bulan                                 | 100,000   |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                      | 1 Unit                                                  | 55,000  | 1 Unit   | 55,000  | 1 Unit   | 55,000  | 1 Unit   | 55,000  | 4 Unit                                   | 220,000   |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                     | INDIKATOR KINERJA                                                                        | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |           |           |           |           |           |           |            |                                          |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------|------------|
|    |                                                                          |                                                                                          |                      | 2021                                                    |           | 2022      |           | 2023      |           | 2024      |            | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |            |
|    |                                                                          |                                                                                          |                      | TARGET                                                  | RP        | TARGET    | RP        | TARGET    | RP        | TARGET    | RP         | TARGET                                   | RP         |
| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                        | 4                    | 7                                                       | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14         | 15                                       | 16         |
| 2  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>     | <b>Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</b>                         |                      | 80 %                                                    | 1,469,716 | 80 %      | 3,245,602 | 80 %      | 8,007,790 | 80 %      | 13,656,592 | 80 %                                     | 26,379,700 |
|    | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>                    | <b>Persentase Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>                           |                      | 100 %                                                   | -         | 100 %     | 400,000   | 100 %     | 900,000   | 100 %     | 900,000    | 100 %                                    | 2,200,000  |
|    | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi              | Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                      |                      | -                                                       | -         | 1 Dokumen | 375,000   | 1 Dokumen | 800,000   | 1 Dokumen | 800,000    | 3 Dokumen                                | 1,975,000  |
|    | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi |                      | -                                                       | -         | 1 Kali    | 25,000    | 2 Kali    | 100,000   | 2 Kali    | 100,000    | 5 Kali                                   | 225,000    |
|    | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>                   | <b>Presentase Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan Provinsi</b>           |                      | 80 %                                                    | 504,716   | 80 %      | 1,623,052 | 100 %     | 4,392,790 | 100 %     | 8,681,592  | 100 %                                    | 15,202,150 |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                       | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                       | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                |              |                |              |                |              |                |                                             |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                            |                            | 2021                                                    |                | 2022         |                | 2023         |                | 2024         |                | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PERIODE RPJMD |                  |
|    |                                                                                     |                                                                                            |                            | TARGET                                                  | RP             | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET                                      | RP               |
| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                                          | 4                          | 7                                                       | 8              | 9            | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15                                          | 16               |
|    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                     | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                |                            | 4 Lokasi                                                | 504,716        | 4 Lokasi     | 1,600,166      | 6 Lokasi     | 4,292,790      | 6 Lokasi     | 8,581,592      | 20 Lokasi                                   | 14,979,264       |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                    | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                    |                            | -                                                       | -              | 5 Unit       | 22,885         | 10 Unit      | 100,000        | 10 Unit      | 100,000        | 25 Unit                                     | 222,885          |
|    | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>                                        | <b>Persentase pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>                                    |                            | <b>100 %</b>                                            | <b>195,000</b> | <b>100 %</b> | <b>335,000</b> | <b>100 %</b> | <b>550,000</b> | <b>100 %</b> | <b>650,000</b> | <b>100 %</b>                                | <b>1,730,000</b> |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)              | Jumlah lokasi rehabilitasi/ pemeliharaan Terminal Tipe B                                   |                            | 1 Lokasi                                                | 120,000        | 1 Lokasi     | 135,000        | 1 Lokasi     | 300,000        | 1 Lokasi     | 300,000        | 4 Lokasi                                    | 855,000          |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B                                 | Jumlah bulan peningkatan kapasitas SDM pengelola Terminal Tipe B                           |                            | 12 bulan                                                | 75,000         | 12 bulan     | 200,000        | 12 bulan     | 250,000        | 12 bulan     | 350,000        | 48 Bulan                                    | 875,000          |
|    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b> | <b>Persentase pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b> |                            | <b>100 %</b>                                            | <b>115,000</b> | <b>100 %</b> | <b>176,000</b> | <b>100 %</b> | <b>440,000</b> | <b>100 %</b> | <b>900,000</b> | <b>100 %</b>                                | <b>1,631,000</b> |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                                                        | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |        |           |        |           |         |           |         |                                             |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                      |                            | 2021                                                    |        | 2022      |        | 2023      |         | 2024      |         | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PERIODE RPJMD |         |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                      |                            | TARGET                                                  | RP     | TARGET    | RP     | TARGET    | RP      | TARGET    | RP      | TARGET                                      | RP      |
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                    | 4                          | 7                                                       | 8      | 9         | 10     | 11        | 12      | 13        | 14      | 15                                          | 16      |
|    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                            | Jumlah Dokumen Desain Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                             |                            | 1 Dokumen                                               | -      | 1 Dokumen | 30,000 | 1 Dokumen | 50,000  | 1 Dokumen | 150,000 | 4 Dokumen                                   | 230,000 |
|    | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |                            | 50 Buah                                                 | -      | 50 Buah   | 55,000 | 110 Buah  | 250,000 | 110 Buah  | 550,000 | 320 Buah                                    | 855,000 |
|    | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                   | Jumlah pengendalian pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi (Pengendalian ODOL)     |                            | 12 Kali                                                 | 90,000 | 12 Kali   | 66,000 | 12 Kali   | 90,000  | 12 Kali   | 150,000 | 48 Kali                                     | 396,000 |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                   | Jumlah Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan     |                            | 2 Kali                                                  | 25,000 | 2 Kali    | 25,000 | 2 Kali    | 50,000  | 2 Kali    | 50,000  | 8 Kali                                      | 150,000 |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                             | INDIKATOR KINERJA                                 | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |          |              |               |              |                |              |                |                                          |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                  |                                                   |                      | 2021                                                    |          | 2022         |               | 2023         |                | 2024         |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                |
|    |                                                                                                  |                                                   |                      | TARGET                                                  | RP       | TARGET       | RP            | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET                                   | RP             |
| 1  | 2                                                                                                | 3                                                 | 4                    | 7                                                       | 8        | 9            | 10            | 11           | 12             | 13           | 14             | 15                                       | 16             |
|    |                                                                                                  | Angkutan jalan (Forum LLAJ)                       |                      |                                                         |          |              |               |              |                |              |                |                                          |                |
|    | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                              | <b>Persentase Keselamatan di Jalan Provinsi</b>   |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>-</b> | <b>100 %</b> | <b>50,000</b> | <b>100 %</b> | <b>300,000</b> | <b>100 %</b> | <b>300,000</b> | <b>100 %</b>                             | <b>650,000</b> |
|    | Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor          | Jumlah Kegiatan Penelitian DRK                    |                      | -                                                       | -        | 2 Kali       | 15,000        | 4 Kali       | 100,000        | 4 Kali       | 100,000        | 10 Kali                                  | 215,000        |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Tipe B                                       | Jumlah Kegiatan Monitoring Terminal Tipe B        |                      | -                                                       | -        | 2 Kali       | 15,000        | 4 Kali       | 100,000        | 4 Kali       | 100,000        | 10 Kali                                  | 215,000        |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Layanan Pembinaan Keselamatan Transportasi |                      | -                                                       | -        | 2 Kali       | 20,000        | 4 Kali       | 100,000        | 4 Kali       | 100,000        | 10 Kali                                  | 220,000        |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                              | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |         |         |         |         |           |         |           |                                          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      | 2021                                                    |         | 2022    |         | 2023    |           | 2024    |           | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |           |
|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      | TARGET                                                  | RP      | TARGET  | RP      | TARGET  | RP        | TARGET  | RP        | TARGET                                   | RP        |
| 1  | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                                              | 4                    | 7                                                       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12        | 13      | 14        | 15                                       | 16        |
|    | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                 | <b>Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> |                      | 100 %                                                   | 350,000 | 100 %   | 321,000 | 100 %   | 350,000   | 100 %   | 650,000   | 100 %                                    | 1,671,000 |
|    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                        | Jumlah Pengawasan Perizinan Angkutan Umum                                                                                      |                      | 12 Kali                                                 | 50,000  | 12 Kali | 36,000  | 12 Kali | 50,000    | 12 Kali | 50,000    | 48 Kali                                  | 186,000   |
|    | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah pengendalian Ketersediaan Angkutan Umum pada saat Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru                                   |                      | 4 Kali                                                  | 300,000 | 4 Kali  | 285,000 | 4 Kali  | 300,000   | 4 Kali  | 600,000   | 16 Kali                                  | 1,485,000 |
|    | <b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan</b>                                                                                  | <b>Persentase tersedianya Dokumen Pengembangan Pelayanan,</b>                                                                  |                      | 100 %                                                   | 260,000 | 100 %   | 265,000 | 100 %   | 1,000,000 | 100 %   | 1,500,000 | 100 %                                    | 3,025,000 |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                      | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |         |           |         |           |           |           |           |                                          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                      | 2021                                                    |         | 2022      |         | 2023      |           | 2024      |           | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |           |
|    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                      | TARGET                                                  | RP      | TARGET    | RP      | TARGET    | RP        | TARGET    | RP        | TARGET                                   | RP        |
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                      | 4                    | 7                                                       | 8       | 9         | 10      | 11        | 12        | 13        | 14        | 15                                       | 16        |
|    | Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                   | Buku Perhubungan dalam Angka dan ketersediaan teknologi sektor pelayanan jasa transportasi                                                             |                      |                                                         |         |           |         |           |           |           |           |                                          |           |
|    | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                            | Jumlah Dokumen Teknologi sektor pelayanan jasa transportasi dan Buku Perhubungan dalam Angka                                                           |                      | 3 Dokumen                                               | 260,000 | 3 Dokumen | 265,550 | 2 Dokumen | 1,000,000 | 2 Dokumen | 1,500,000 | 10 Dokumen                               | 3,025,000 |
|    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase tertib administrasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                      | 100 %                                                   | 45,000  | 100 %     | 75,000  | 100 %     | 75,000    | 100 %     | 75,000    | 100 %                                    | 270,000   |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                           | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                  |              |                |              |                |              |                |                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                      | 2021                                                    |                  | 2022         |                | 2023         |                | 2024         |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                  |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                      | TARGET                                                  | RP               | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET                                   | RP               |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                           | 4                    | 7                                                       | 8                | 9            | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15                                       | 16               |
|    | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah laporan pendataan kendaraan umum yang sesuai perizinan                                                                                               |                      | 12 Bulan                                                | 45,000           | 12 Bulan     | 75,000         | 12 Bulan     | 75,000         | 12 Bulan     | 75,000         | 48 Bulan                                 | 270,000          |
| 3  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                     | <b>Persentase pengelolaan pelayaran</b>                                                                                                                     |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>1,675,000</b> | <b>100 %</b> | <b>190,800</b> | <b>100 %</b> | <b>450,000</b> | <b>100 %</b> | <b>675,000</b> | <b>100 %</b>                             | <b>2,990,800</b> |
|    | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan</b>           | <b>Persentase kegiatan penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan</b> |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>50,000</b>    | <b>100 %</b> | <b>35,000</b>  | <b>100 %</b> | <b>50,000</b>  | <b>100 %</b> | <b>50,000</b>  | <b>100 %</b>                             | <b>185,000</b>   |



| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                          | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |        |          |        |          |        |          |        |                                          |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      | 2021                                                    |        | 2022     |        | 2023     |        | 2024     |        | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      | TARGET                                                  | RP     | TARGET   | RP     | TARGET   | RP     | TARGET   | RP     | TARGET                                   | RP      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                          | 4                    | 7                                                       | 8      | 9        | 10     | 11       | 12     | 13       | 14     | 15                                       | 16      |
|    | Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas |                      |                                                         |        |          |        |          |        |          |        |                                          |         |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas | Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat     |                      | 12 Bulan                                                | 50,000 | 12 Bulan | 35,000 | 12 Bulan | 50,000 | 12 Bulan | 50,000 | 48 Bulan                                 | 185,000 |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                        | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |                  |              |                |              |                |              |                |                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                                |                                                                                                          |                      | 2021                                                    |                  | 2022         |                | 2023         |                | 2024         |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                  |
|    |                                                                                                |                                                                                                          |                      | TARGET                                                  | RP               | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET       | RP             | TARGET                                   | RP               |
| 1  | 2                                                                                              | 3                                                                                                        | 4                    | 7                                                       | 8                | 9            | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15                                       | 16               |
|    | <b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b> | <b>Persentase terlaksananya pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional</b> |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>1,575,000</b> | <b>100 %</b> | <b>115,000</b> | <b>100 %</b> | <b>350,000</b> | <b>100 %</b> | <b>575,000</b> | <b>100 %</b>                             | <b>2,615,000</b> |
|    | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       | Jumlah kebutuhan pembangunan dan pengawasan Pelabuhan Regional di Provinsi Lampung                       |                      | 1 Lokasi                                                | 1,500,000        | 1 Lokasi     | 50,000         | 1 Lokasi     | 275,000        | 1 Lokasi     | 500,000        | 4 Lokasi                                 | 2,325,000        |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                    | Jumlah bulan pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                 |                      | 12 Bulan                                                | 75,000           | 12 Bulan     | 65,000         | 12 Bulan     | 75,000         | 12 Bulan     | 75,000         | 48 Bulan                                 | 290,000          |
|    | <b>Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>       | <b>Persentase tercapainya rapat koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan</b>  |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>50,000</b>    | <b>100 %</b> | <b>40,800</b>  | <b>100 %</b> | <b>50,000</b>  | <b>100 %</b> | <b>50,000</b>  | <b>100 %</b>                             | <b>190,800</b>   |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                    | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |               |              |               |              |               |              |               |                                          |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                      | 2021                                                    |               | 2022         |               | 2023         |               | 2024         |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |                |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                      | TARGET                                                  | RP            | TARGET       | RP            | TARGET       | RP            | TARGET       | RP            | TARGET                                   | RP             |
| 1  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                    | 4                    | 7                                                       | 8             | 9            | 10            | 11           | 12            | 13           | 14            | 15                                       | 16             |
|    |                                                                                                                     | pada transportasi laut termasuk sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional |                      |                                                         |               |              |               |              |               |              |               |                                          |                |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada Transportasi Laut                              |                      | 1 Kali                                                  | 50,000        | 1 Kali       | 40,800        | 1 Kali       | 50,000        | 1 Kali       | 50,000        | 4 Kali                                   | 190,800        |
| 4  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>                                                                           | <b>Persentase pengelolaan perkeretaapian</b>                                                                                         |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>45,000</b> | <b>100 %</b> | <b>50,000</b> | <b>100 %</b> | <b>50,000</b> | <b>100 %</b> | <b>50,000</b> | <b>100 %</b>                             | <b>195,000</b> |
|    | <b>Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur</b>                                              | <b>Persentase koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian</b>                                                              |                      | <b>100 %</b>                                            | <b>45,000</b> | <b>100 %</b> | <b>50,000</b> | <b>100 %</b> | <b>50,000</b> | <b>100 %</b> | <b>50,000</b> | <b>100 %</b>                             | <b>195,000</b> |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                     | KONDISI KINERJA AWAL | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (x 1000) |        |        |        |         |        |         |        |                                          |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                       |                      | 2021                                                    |        | 2022   |        | 2023    |        | 2024    |        | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |         |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                       |                      | TARGET                                                  | RP     | TARGET | RP     | TARGET  | RP     | TARGET  | RP     | TARGET                                   | RP      |
| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                     | 4                    | 7                                                       | 8      | 9      | 10     | 11      | 12     | 13      | 14     | 15                                       | 16      |
|    | Perkeretaapian Provinsi                                                                                                                           | masalah Kereta Api                                                                    |                      |                                                         |        |        |        |         |        |         |        |                                          |         |
|    | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi | Jumlah Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api |                      | 6 kali                                                  | 45,000 | 6 kali | 50,000 | 12 Kali | 50,000 | 12 Kali | 50,000 | 36 Kali                                  | 195,000 |

# Bab 7

## **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah Dinas Perhubungan setiap tahun (benchmark) atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan pada RPJMD Tahun 2022-2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada halaman terlampir.

Tabel 7.1 Rencana Program dan Kegiatan dan sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

MATRIK RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

| KODE | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                  | Lokasi        | 2020                   |                      | 2021                   |      | 2022                   |      | 2023                   |      | 2024                   |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|      |                                                                                        |                                                                                  |               | Target Capaian Kinerja | Pagu                 | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu |
| 1    | 2                                                                                      | 3                                                                                | 4             |                        |                      | 5                      | 6    | 5                      | 6    | 9                      | 10   | 9                      | 10   |
|      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                      | <b>Tingkat Layanan administrasi perkantoran</b>                                  |               | <b>75%</b>             | <b>3.142.000.000</b> |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik                                 | Jumlah Bulan Terbayarnya Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik             | Prov. Lampung | 12 Bulan               | 420.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                  | Jumlah bulan pengelolaan anggaran kantor                                         | Prov. Lampung | 12Bulan                | 300.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                      | Jumlah Petugas kebersihan di lingkungan kantor                                   | Prov. Lampung | 8 Orang                | 100.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                           | Jumlah Pengadaan ATK dan Jasa Surat Menyurat                                     | Prov. Lampung | 80%                    | 85.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan                                                 | Jumlah tersediannya barang cetakan dan pengadaan                                 | Prov. Lampung | 35.000 Lembar          | 70.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor                                      | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | Prov. Lampung | 20 Unit                | 75.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyediaan Peralatan rumah tangga dan Peralatan Listrik                                | Jumlah bulan tersediannya peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan.   | Prov. Lampung | 50 Jenis               | 40.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan                               | Jumlah surat kabar dan Bahan bacaan                                              | Prov. Lampung | 7 Buku                 | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat                                                   | Jumlah layanan makan minum                                                       | Prov. Lampung | 1200 Orang             | 65.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                                                  | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi                                                 | Prov. Lampung | 85 Kali                | 430.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyedia Jasa Keamanan Kantor                                                          | Jumlah Tenaga Keamanan Kantor                                                    | Prov. Lampung | 3Orang                 | 77.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyedia Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran                         | Jumlah tenaga PTHL                                                               | Prov. Lampung | Orang                  | 1.430.000.000        |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                               | <b>Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor</b>                                       |               | <b>75%</b>             | <b>817.000.000</b>   |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                   | Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                      | Prov. Lampung | 10 Unit                | 75.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                      | Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor                                         | Prov. Lampung |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                  | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                                | Prov. Lampung | 5 Gedung               | 280.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan                                               | Jumlah Pemeliharaan mobil jabatan                                                | Prov. Lampung |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional                                 | Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas operasional                                  | Prov. Lampung | 13 Unit                | 462.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>                      | <b>Meningkatkan kapasitas Aparatur</b>                                           |               | <b>65%</b>             | <b>310.000.000</b>   |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                        | Jumlah pakaian dinas pegawai                                                     | Prov. Lampung | 200 Stel               | 130.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur                                        | Jumlah kegiatan capaian kinerja dan kehadiran bulanan                            | Prov. Lampung | 2 Keg                  | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                        | - Jumlah Pembinaan Budaya Kerja                                                  |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                        | - Jumlah Dokumen Pemuktahiran Anjab, ABK, Evjab dll.                             |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional                                | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi                                 | Prov. Lampung | 20 Orang               | 100.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Sosialisasi Kesetaraan Gender                                                          | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kesetaran Gender                              | Prov. Lampung |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik                       | Jumlah Kegiatan Tingkat pelayanan informasi publik                               | Prov. Lampung | 1 Keg                  | 30.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan</b> |               | <b>70%</b>             | <b>2.618.000.000</b> |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |



| KODE | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Lokasi        | 2020                   |                      | 2021                   |      | 2022                   |      | 2023                   |      | 2024                   |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |               | Target Capaian Kinerja | Pagu                 | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu |
| 1    | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                    | 4             |                        |                      | 5                      | 6    | 5                      | 6    | 9                      | 10   | 9                      | 10   |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                                                                                                   | Prov. Lampung | 3 Dok                  | 1.668.000.000        |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja                                                      | jumlah dokumen (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR) dan Pelaporan (Lakip, LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja,Evaluasi Rencana Aksi, buku perhubungan dalam angka, monitoring). | Prov. Lampung | 16 Dok                 | 370.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyusunan Laporan Capaian Keuangan                                                          | Persentase Pengelolaan Keuangan OPD                                                                                                                                                  | Prov. Lampung | 80%                    | 150.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan                         | Persentase Terlaksananya Publikasi dan Pameran                                                                                                                                       | Prov. Lampung | 80%                    | 400.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Aset Daerah                                          | Jumlah Dokumen Aset Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                               | Prov. Lampung | 4 Dok                  | 30.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan</b>             | <b>Peningkatan Jaringan Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan</b>                                                                                                               |               | <b>75%</b>             | <b>1.025.000.000</b> |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Forum Perkeretaapi                                                                           | Jumlah Bulan Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Keretaapi                                                                                  | Prov. Lampung | 12 Bulan               | 75.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                              | Sosialisasi Penetapan Lokasi Longcut Tegineneng - Tarahan                                                                                                                            |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengembangan Jaringan Transportasi di Provinsi Lampung                                       | Jumlah Dokumen pengembangan Jaringan Transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan                                                                                                | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 400.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengembangan Pelayanan Transportasi di Provinsi Lampung                                      | Jumlah Dokumen Pengembangan Pelayanan                                                                                                                                                | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 400.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Lampung                          | Jumlah Ketersediaan Teknologi sektor pelayanan jasa trasnportasi                                                                                                                     | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyusunan Produk Hukum sektor transportasi di Provinsi Lampung                              | Jumlah kajian teknis dasar pengesahan produk Hukum sektor transportasi<br>- Kajian Teknis Pembentukan BLUD                                                                           | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 100.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum</b>                                           | <b>Meningkatnya Kinerja Angkutan Umum dan Layanan Perizinan</b>                                                                                                                      |               | <b>65%</b>             | <b>500.000.000</b>   |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Forum LLAJ                                                                                   | JumlahBulan Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan                                                        | Prov. Lampung | 12 Bulan               | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengawasan Teknis Pelabuhan                                                                  | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis pelabuhan regional dan TUKS                                                                                                          | Prov. Lampung | 1 Keg                  | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pendataan Perizinan Angkutan Umum dan barang di Provinsi Lampung                             | Jumlah Kendaraan yang memiliki dan tidak memiliki izin                                                                                                                               | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 200.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Surve Load Faktor Angkutan dan Kinerja Transportasi (darat, laut,udara dan kereta api)       | Jumlah Dokumen surve load factor                                                                                                                                                     | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Surve LHR (lalu lintas harian rata-rata) di ruas jalan provinsi lampung                      | Jumlah dokumen surve LHR                                                                                                                                                             | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Provinsi Lampung                            | Jumlah Dokumen desain manajemen dan rekayasa lalu lintas                                                                                                                             | Prov. Lampung | 1 Dok                  | 100.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan</b>                       | <b>Peningkatan pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan</b>                                                                                                           |               | <b>70%</b>             | <b>1.103.000.000</b> |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan                                        | Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan di jalan provinsi                                                                                                                                | Prov. Lampung | <b>5544 Buah</b>       | 1.003.000.000        |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengadaan Peralatan keselamatan dan Fasilitas Pendukung ( Darat, Laut, Udara dan Kereta api) | Jumlah peralatan keselamatan dan Fasilitas pendukung                                                                                                                                 | Prov. Lampung | 2 Buah                 | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Forum Kepelabuhanan                                                                          | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada Transportasi Laut.                                                                    | Prov. Lampung | 1 Keg                  | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ</b>            | <b>Meningkatnya pemeliharaan terminal, pelabuhan dan fasilitas LLAJ</b>                                                                                                              |               | <b>70%</b>             | <b>450.000.000</b>   |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Rehabilitasi /pemeliharaan sarana, prasarana Terminal tipe B dan Pelabuhan                   | Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal tipe B dan Pelabuhan regional terpelihara                                                                                           | Prov. Lampung | 1 Lokasi               | 400.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ.                                                    | Jumlah fasilitas LLAJ terehabilitasi                                                                                                                                                 | Prov. Lampung | 1 Paket                | 50.000.000           |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |               |                        |                      |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | <b>Program Pengendalian, Pengamanan dan Operasional Transportasi</b>                         | <b>peningkatan usaha pengendalian, pengamanan dan operasional transportasi</b>                                                                                                       |               | <b>70%</b>             | <b>1.430.000.000</b> |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Pengaturan Lalu Lintas pada event-event tertentu di Provinsi Lampung                         | Jumlah bulan kegiatan pengaturan lalu lintas untuk tamu-tamu negara, dan petugas PAM lalin di daerah rawan macet dengan lancar dan tertib                                            | Prov. Lampung | 12 Bulan               | 250.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |
|      | Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta Pengendalian Angkutan Haji      | 1. Operasional Petugas Angkutan Lebaran<br>2. Operasional Petugas Angkutan Haji<br>3. Operasional Petugas Angkutan Natal<br>4. Operasional Petugas Tahun Baru                        | Prov. Lampung | 4 Keg                  | 530.000.000          |                        |      |                        |      |                        |      |                        |      |



| KODE            | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Lokasi               | 2020                   |                    | 2021                   |                       | 2022                   |                       | 2023                   |                       | 2024                   |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      | Target Capaian Kinerja | Pagu               | Target Capaian Kinerja | Pagu                  | Target Capaian Kinerja | Pagu                  | Target Capaian Kinerja | Pagu                  | Target Capaian Kinerja | Pagu                  |
| 1               | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                        | 4                    |                        |                    | 5                      | 6                     | 5                      | 6                     | 9                      | 10                    | 9                      | 10                    |
|                 | Pengendalian Pengoperasian angkutan umum                                                                           | Jumlah usaha pengendalian pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi                                                                                                       | Prov. Lampung        | 1 Keg                  | 50.000.000         |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Pengoperasian Terminal Tipe B                                                                                      | Jumlah terminal tipe B beroperasi                                                                                                                                                        | Prov. Lampung        | 2 Lokasi               | 400.000.000        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Pengoperasian Kapal Bantuan                                                                                        | Jumlah Kapal beroperasi                                                                                                                                                                  | Prov. Lampung        | 1 Unit                 | 200.000.000        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | <b>Program Peningkatan Keselamatan Transportasi</b>                                                                | <b>Meningkatnya Pembinaan terhadap Keselamatan Transportasi kepada masyarakat</b>                                                                                                        |                      | <b>70%</b>             | <b>605.000.000</b> |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Pendidikan dan Pelatihan Potensi SAR Daerah                                                                        | Jumlah peserta pelatihan SAR                                                                                                                                                             | Prov. Lampung        | 75 Peserta             | 100.000.000        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Provinsi Lampung                                                      | Jumlah peserta pelajar Pelopor                                                                                                                                                           | Prov. Lampung        | 50 Peserta             | 150.000.000        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Pemilihan dan pemberian penghargaan juru mudi awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Lampung | Jumlah peserta AKUT                                                                                                                                                                      | Prov. Lampung        | 75 Peserta             | 105.000.000        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Nasional                                  | Jumlah Kab / kota                                                                                                                                                                        | Prov. Lampung        | 10 Kab/Kot             | 50.000.000         |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Lampung                                                          | Terselenggaranya Kegiatan Keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat pengguna Jalan                                                                                                      | Prov. Lampung        | 1 Keg                  | 100.000.000        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 | Forum Keudaraan                                                                                                    | Jumlah Bulan Kegiatan Forum Keudaraan                                                                                                                                                    | Prov. Lampung        | 12 Bulan               | 100.000.000        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2.15.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                                                | <b>Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                 | <b>Prov. Lampung</b> |                        |                    | <b>100%</b>            | <b>18.159.286.800</b> | <b>100%</b>            | <b>18.354.901.000</b> | <b>100%</b>            | <b>18.826.450.000</b> | <b>100%</b>            | <b>19.276.450.000</b> |
| 2.15.01.1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                            | <b>Persentase pelayanan perkantoran yang dilaksanakan</b>                                                                                                                                | <b>Prov. Lampung</b> |                        |                    | <b>100%</b>            | <b>1.085.868.800</b>  | <b>100%</b>            | <b>449.183.000</b>    | <b>100%</b>            | <b>1.065.000.000</b>  | <b>100%</b>            | <b>1.065.000.000</b>  |
| 2.15.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | Prov. Lampung        |                        |                    | 9 Dokumen              | 1.000.868.800         | 9 Dokumen              | 384.183.000           | 9 Dokumen              | 1.000.000.000         | 9 Dokumen              | 1.000.000.000         |
| 2.15.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                         | Prov. Lampung        |                        |                    | 1 Dokumen              | 10.000.000            |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2.15.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                     | Prov. Lampung        |                        |                    | 1 Dokumen              | 10.000.000            |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2.15.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKj, LKPJ, LPPD) | Prov. Lampung        |                        |                    | 3 Laporan              | 30.000.000            | 3 Laporan              | 30.000.000            | 3 Laporan              | 30.000.000            | 3 Laporan              | 30.000.000            |
| 2.15.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, Evaluasi Renstra, monitoring)                                                                   | Prov. Lampung        |                        |                    | 3 Laporan              | 35.000.000            | 3 Laporan              | 35.000.000            | 3 Laporan              | 35.000.000            | 3 Laporan              | 35.000.000            |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2.15.01.1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>Persentase tercapainya tertib administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                                                                              | <b>Prov. Lampung</b> |                        |                    | <b>100%</b>            | <b>12.801.950.000</b> | <b>100%</b>            | <b>12.429.000.000</b> | <b>100%</b>            | <b>12.786.950.000</b> | <b>100%</b>            | <b>12.786.950.000</b> |
| 2.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                        | Prov. Lampung        |                        |                    | 110 OB                 | 12.686.950.000        | 110 OB                 | 12.392.000.000        | 110 OB                 | 12.686.950.000        | 110 OB                 | 12.686.950.000        |
| 2.15.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                       | Prov. Lampung        |                        |                    | 7 Dokumen              | 25.000.000            | 7 Dokumen              | 25.000.000            | 7 Dokumen              | 25.000.000            | 7 Dokumen              | 25.000.000            |
| 2.15.01.1.03.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                           | Prov. Lampung        |                        |                    | 3 Dokumen              | 75.000.000            | 3 Dokumen              | 12.000.000            | 3 Dokumen              | 75.000.000            | 3 Dokumen              | 75.000.000            |
| 2.15.01.1.03.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                                 | Prov. Lampung        |                        |                    | 3 Dokumen              | 10.000.000            | 3 Dokumen              |                       | 3 Dokumen              |                       | 3 Dokumen              |                       |
| 2.15.01.1.03.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                        | Prov. Lampung        |                        |                    | 7 Dokumen              | 5.000.000             | 7 Dokumen              |                       | 7 Dokumen              |                       | 7 Dokumen              |                       |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2.15.01.1.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      | <b>Persentase tercapainya tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                                              | <b>Prov. Lampung</b> |                        |                    | <b>100%</b>            | <b>20.000.000</b>     | <b>100%</b>            | <b>3.000.000</b>      | <b>100%</b>            | <b>10.000.000</b>     | <b>100%</b>            | <b>10.000.000</b>     |
| 2.15.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                         | Prov. Lampung        |                        |                    | 2 Laporan              | 3.000.000             | 2 Laporan              |                       | 2 Laporan              |                       | 2 Laporan              |                       |
| 2.15.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                               | Prov. Lampung        |                        |                    | 1 Laporan              | 17.000.000            | 1 Laporan              | 3.000.000             | 1 Laporan              | 10.000.000            | 1 Laporan              | 10.000.000            |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2.15.01.1.04    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                                  | <b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                             | <b>Prov. Lampung</b> |                        |                    | <b>12 Dokumen</b>      | <b>4.000.000</b>      |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2.15.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                                              | Prov. Lampung        |                        |                    | 12 laporan             | 4.000.000             |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                    |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |

| KODE            | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                               | Lokasi        | 2020                   |      | 2021                   |               | 2022                   |               | 2023                   |               | 2024                   |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |               | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu          | Target Capaian Kinerja | Pagu          | Target Capaian Kinerja | Pagu          | Target Capaian Kinerja | Pagu          |
| 1               | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                             | 4             |                        |      | 5                      | 6             | 5                      | 6             | 9                      | 10            | 9                      | 10            |
| 2.15.01.1.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | - Persentase tercapainya kapasitas sumber daya ASN yang berkualitas                                                           | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 306.000.000   | 100%                   | 468.000.000   | 100%                   | 543.000.000   | 100%                   | 543.000.000   |
| 2.15.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                        | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 1 Paket                | 175.000.000   | 1 Paket                | 250.000.000   | 1 Paket                | 250.000.000   |
| 2.15.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                              | Prov. Lampung |                        |      | 12 Bulan               | 5.000.000     |                        |               |                        |               |                        |               |
| 2.15.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                  | Prov. Lampung |                        |      | 12 Bulan               | 3.000.000     |                        |               |                        |               |                        |               |
| 2.15.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                            | Prov. Lampung |                        |      | 12 Bulan               | 5.000.000     |                        |               |                        |               |                        |               |
| 2.15.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                           | Prov. Lampung |                        |      | 10 orang               | 143.000.000   | 10 orang               | 143.000.000   | 10 orang               | 143.000.000   | 10 orang               | 143.000.000   |
| 2.15.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk Provinsi) | Prov. Lampung |                        |      | 50 Orang               | 150.000.000   | 50 Orang               | 150.000.000   | 50 Orang               | 150.000.000   | 50 Orang               | 150.000.000   |
| 2.15.01.1.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Persentase tercapainya tertib administrasi umum perangkat daerah                                                              | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 1.233.000.000 | 100%                   | 1.081.000.000 | 100%                   | 1.221.000.000 | 100%                   | 1.221.000.000 |
| 2.15.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                            | Prov. Lampung |                        |      | 12 paket               | 12.000.000    | 12 paket               | 12.000.000    | 12 paket               | 12.000.000    | 12 paket               | 12.000.000    |
| 2.15.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                           | Prov. Lampung |                        |      | 12 paket               | 10.000.000    | 12 paket               | 10.000.000    | 12 paket               | 10.000.000    | 12 paket               | 10.000.000    |
| 2.15.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                     | Prov. Lampung |                        |      | 12 paket               | 45.000.000    | 12 paket               | 45.000.000    | 12 paket               | 45.000.000    | 12 paket               | 45.000.000    |
| 2.15.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                  | Prov. Lampung |                        |      | 12 bulan               | 5.000.000     | 12 bulan               | 5.000.000     | 12 bulan               | 5.000.000     | 12 bulan               | 5.000.000     |
| 2.15.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                   | Prov. Lampung |                        |      | 12 paket               | 101.000.000   | 12 paket               | 61.000.000    | 12 paket               | 101.000.000   | 12 paket               | 101.000.000   |
| 2.15.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rapat Dinas)                                                                        | Prov. Lampung |                        |      | 12 Dokumen             | 48.000.000    | 12 Dokumen             | 48.000.000    | 12 Dokumen             | 48.000.000    | 12 Dokumen             | 48.000.000    |
| 2.15.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | Prov. Lampung |                        |      | 117 Laporan            | 1.000.000.000 | 117 Laporan            | 900.000.000   | 117 Laporan            | 1.000.000.000 | 117 Laporan            | 1.000.000.000 |
| 2.15.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                          | Prov. Lampung |                        |      | 12 Dokmen              | 3.000.000     |                        |               |                        |               |                        |               |
| 2.15.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                         | Prov. Lampung |                        |      | 12 Dokmen              | 9.000.000     |                        |               |                        |               |                        |               |
| 2.15.01.1.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah                                                   | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 187.968.000   | 100%                   | 1.225.268.000 | 100%                   | 680.000.000   | 100%                   | 1.130.000.000 |
| 2.15.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                         | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 1 Unit                 | 1.105.300.000 | 1 Unit                 | 500.000.000   | 1 Unit                 | 800.000.000   |
| 2.15.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                            | Prov. Lampung |                        |      | 1 Paket                | 10.000.000    | 1 Paket                | 10.000.000    | 1 Paket                | 30.000.000    | 1 Paket                | 30.000.000    |
| 2.15.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                       | Prov. Lampung |                        |      | 2 Unit                 | 140.000.000   | 2 Unit                 | 87.000.000    | 2 Unit                 | 100.000.000   | 2 Unit                 | 250.000.000   |
| 2.15.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | Prov. Lampung |                        |      | 1 Unit                 | 37.968.000    | 1 Unit                 | 22.968.000    | 1 Unit                 | 50.000.000    | 1 Unit                 | 50.000.000    |
| 2.15.01.1.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                                              | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 1.970.500.000 | 100%                   | 2.149.450.000 | 100%                   | 1.970.500.000 | 100%                   | 1.970.500.000 |
| 2.15.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                 | Prov. Lampung |                        |      | 12 Laporan             | 12.000.000    | 12 Laporan             | 12.000.000    | 12 Laporan             | 12.000.000    | 12 Laporan             | 12.000.000    |
| 2.15.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                        | Prov. Lampung |                        |      | 12 Laporan             | 300.000.000   | 12 Laporan             | 300.000.000   | 12 Laporan             | 300.000.000   | 12 Laporan             | 300.000.000   |
| 2.15.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Gaji PTHL, OB dll)                                      | Prov. Lampung |                        |      | 12 Laporan             | 1.658.500.000 | 12 Laporan             | 1.837.450.000 | 12 Laporan             | 1.658.500.000 | 12 Laporan             | 1.658.500.000 |
| 2.15.01.1.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan                                                   | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 550.000.000   | 100%                   | 550.000.000   | 100%                   | 550.000.000   | 100%                   | 550.000.000   |
| 2.15.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                        | Prov. Lampung |                        |      | 2 Unit                 | 90.000.000    | 2 Unit                 | 90.000.000    | 2 Unit                 | 90.000.000    | 2 Unit                 | 90.000.000    |
| 2.15.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                        | Prov. Lampung |                        |      | 11 Unit                | 380.000.000   | 11 Unit                | 380.000.000   | 11 Unit                | 380.000.000   | 11 Unit                | 380.000.000   |
| 2.15.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                            | Prov. Lampung |                        |      | 24 Unit                | 25.000.000    | 24 Unit                | 25.000.000    | 24 Unit                | 25.000.000    | 24 Unit                | 25.000.000    |
| 2.15.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                      | Prov. Lampung |                        |      | 1 Unit                 | 55.000.000    | 1 Unit                 | 55.000.000    | 1 Unit                 | 55.000.000    | 1 Unit                 | 55.000.000    |
| 2,15            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                             |                                                                                                                               |               |                        |      |                        |               |                        |               |                        |               |                        |               |

| KODE            | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Lokasi        | 2020                   |      | 2021                   |               | 2022                   |               | 2023                   |               | 2024                   |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |               | Target Capaian Kinerja | Pagu | Target Capaian Kinerja | Pagu          | Target Capaian Kinerja | Pagu          | Target Capaian Kinerja | Pagu          | Target Capaian Kinerja | Pagu           |
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4             |                        |      | 5                      | 6             | 5                      | 6             | 9                      | 10            | 9                      | 10             |
| 2.15.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                     | Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan                                                                                                                                       | Prov. Lampung |                        |      | 80%                    | 1.469.716.500 | 80%                    | 3.503.302.300 | 80%                    | 8.007.790.910 | 80%                    | 13.656.592.525 |
| 2.15.02.1.01    | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                    | Persentase Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                         | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | -             | 100%                   | 400.000.000   | 100%                   | 900.000.000   | 100%                   | 900.000.000    |
| 2.15.02.1.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                       | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                  | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 1 dokumen              | 375.000.000   | 1 dokumen              | 800.000.000   | 1 dokumen              | 800.000.000    |
| 2.15.02.1.01.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                          | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                         | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 1 dokumen              | 25.000.000    | 1 dokumen              | 100.000.000   | 1 dokumen              | 100.000.000    |
| 2.15.02.1.02    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                   | Presentase Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan Provinsi                                                                                                                         | Prov. Lampung |                        |      | 80%                    | 504.716.500   | 80%                    | 1.679.010.700 | 100%                   | 4.392.790.910 | 100%                   | 8.681.592.525  |
| 2.15.02.1.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                   | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                                                                                                                       | Prov. Lampung |                        |      | 4 Unit                 | 504.716.500   | 300 Unit               | 1.513.979.700 | 600 Unit               | 4.292.790.910 | 700 Unit               | 8.581.592.525  |
| 2.15.02.1.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara                                                                                                                                   | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 5 Unit                 | 165.031.000   | 10 unit                | 100.000.000   | 10 unit                | 100.000.000    |
| 2.15.02.1.03    | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                             | Persentase pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                                                                | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 195.000.000   | 100%                   | 335.000.000   | 100%                   | 550.000.000   | 100%                   | 650.000.000    |
| 2.15.02.1.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                            | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                             | Prov. Lampung |                        |      | 1 Unit                 | 120.000.000   | 1 Unit                 | 135.000.000   | 1 Unit                 | 300.000.000   | 1 Unit                 | 300.000.000    |
| 2.15.02.1.03.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B                                                                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Honor Operasional Terminal)                                                                                | Prov. Lampung |                        |      | 11 Orang               | 75.000.000    | 11 Orang               | 200.000.000   | 11 Orang               | 250.000.000   | 11 Orang               | 350.000.000    |
| 2.15.02.1.05    | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                      | Persentase pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                             | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 115.000.000   | 100%                   | 176.000.000   | 100%                   | 440.000.000   | 11 Orang               | 900.000.000    |
| 2.15.02.1.05.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                         | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                        | Prov. Lampung |                        |      | 4 Laporan              | -             | 4 Laporan              | 30.000.000    | 4 Laporan              | 50.000.000    | 4 Laporan              | 150.000.000    |
| 2.15.02.1.05.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                              | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan                                                              | Prov. Lampung |                        |      | 50 Unit                | -             | 50 Unit                | 55.000.000    | 110 Unit               | 250.000.000   | 110 Unit               | 550.000.000    |
| 2.15.02.1.05.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Pengendalian ODOL)                                                                           | Prov. Lampung |                        |      | 6 Laporan              | 90.000.000    | 6 Laporan              | 66.000.000    | 6 Laporan              | 90.000.000    | 6 Laporan              | 150.000.000    |
| 2.15.02.1.05.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                               | Prov. Lampung |                        |      | 2 Laporan              | 25.000.000    | 2 Laporan              | 25.000.000    | 4 Laporan              | 50.000.000    | 4 Laporan              | 50.000.000     |
| 2.15.02.1.07    | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                      | Persentase Keselamatan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                        | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | -             | 100%                   | 150.606.000   | 100%                   | 300.000.000   | 100%                   | 300.000.000    |
| 2.15.02.1.07.02 | Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                           | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Penelitian DRK)                                                                                    | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 2 Laporan              | 15.000.000    | 4 Laporan              | 100.000.000   | 4 Laporan              | 100.000.000    |
| 2.15.02.1.07.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                               | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Monitoring Terminal Tipe B)                                                                                                             | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 2 Laporan              | 65.000.000    | 4 Laporan              | 100.000.000   | 4 Laporan              | 100.000.000    |
| 2.15.02.1.07.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (pembinaan keselamatan                                                                      | Prov. Lampung |                        |      |                        |               | 2 Laporan              | 70.606.000    | 4 Laporan              | 100.000.000   | 4 Laporan              | 100.000.000    |
| 2.15.02.1.08    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                      | Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                         | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 350.000.000   | 100%                   | 321.000.000   | 100%                   | 350.000.000   | 100%                   | 650.000.000    |
| 2.15.02.1.08.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                      | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Pengawasan Perizinan Angkutan Umum)                                                   | Prov. Lampung |                        |      | 100 Unit               | 50.000.000    | 100 Unit               | 36.000.000    | 100 Unit               | 50.000.000    | 100 Unit               | 50.000.000     |
| 2.15.02.1.08.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi               | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi(Periode Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru) | Prov. Lampung |                        |      | 4 Laporan              | 300.000.000   | 4 Laporan              | 285.000.000   | 4 Laporan              | 300.000.000   | 4 Laporan              | 600.000.000    |
| 2.15.02.1.09    | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase tersedianya Dokumen Pengembangan Pelayanan, Buku Perhubungan dalam Angka dan ketersediaan teknologi sektor pelayanan jasa transportasi                                               | Prov. Lampung |                        |      | 100%                   | 260.000.000   | 100%                   | 366.685.600   | 100%                   | 1.000.000.000 | 100%                   | 1.500.000.000  |
| 2.15.02.1.09.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                      | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Buku Perhubungan dalam Angka)                                                                | Prov. Lampung |                        |      | 3 Dokumen              | 260.000.000   | 3 Dokumen              | 366.685.600   | 2 Dokumen              | 1.000.000.000 | 2 Dokumen              | 1.500.000.000  |
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |               |                        |      |                        |               |                        |               |                        |               |                        |                |



| KODE            | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi        | 2020                   |                | 2021                   |                | 2022                   |                | 2023                   |                | 2024                   |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Target Capaian Kinerja | Pagu           | Target Capaian Kinerja | Pagu           | Target Capaian Kinerja | Pagu           | Target Capaian Kinerja | Pagu           | Target Capaian Kinerja | Pagu           |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             |                        |                | 5                      | 6              | 5                      | 6              | 9                      | 10             | 9                      | 10             |
| 2.15.02.1.13    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                             | Persentase tertib administrasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                            | Prov. Lampung |                        |                | 100%                   | 45.000.000     | 100%                   | 75.000.000     | 100%                   | 75.000.000     | 100%                   | 75.000.000     |
| 2.15.02.1.13.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                            | Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan                                                                                                                                                                                         | Prov. Lampung |                        |                | 400 Unit               | 45.000.000     | 400 Unit               | 75.000.000     | 400 Unit               | 75.000.000     | 400 Unit               | 75.000.000     |
| 2.15.03         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase pengelolaan pelayaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prov. Lampung |                        |                | 100%                   | 1.675.000.000  | 100%                   | 190.800.000    | 100%                   | 450.000.000    | 100%                   | 675.000.000    |
| 2.15.03.1.06    | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas                                         | Persentase kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas                                                                                                   | Prov. Lampung |                        |                | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 35.000.000     | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 50.000.000     |
| 2.15.03.1.06.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakvat) | Prov. Lampung |                        |                | 12 laporan             | 50.000.000     | 12 laporan             | 35.000.000     | 12 laporan             | 50.000.000     | 12 laporan             | 50.000.000     |
| 2.15.03.1.09    | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                             | Persentase terlaksananya pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prov. Lampung |                        |                | 100%                   | 1.575.000.000  | 100%                   | 115.000.000    | 100%                   | 350.000.000    | 100%                   | 575.000.000    |
| 2.15.03.1.09.02 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prov. Lampung |                        |                | 1 Unit                 | 1.500.000.000  | 1 Unit                 | 50.000.000     | 1 Unit                 | 275.000.000    | 1 Unit                 | 500.000.000    |
| 2.15.03.1.09.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prov. Lampung |                        |                | 1 Unit                 | 75.000.000     | 5 Unit                 | 65.000.000     | 5 Unit                 | 75.000.000     | 5 Unit                 | 75.000.000     |
| 2.15.03.1.11    | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                   | Persentase tercapainya rapat koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada transportasi laut termasuk sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                             | Prov. Lampung |                        |                | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 40.800.000     | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 50.000.000     |
| 2.15.03.1.11.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional (Forum Kepelabuhanan)                                                                                                                                                                                                          | Prov. Lampung |                        |                | 1 Laporan              | 50.000.000     | 1 Laporan              | 40.800.000     | 1 Laporan              | 50.000.000     | 1 Laporan              | 50.000.000     |
| 2.15.04         | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |
|                 | Tidak Ada Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |
| 2.15.05         | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase pengelolaan perkeretaapian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prov. Lampung |                        |                | 100%                   | 45.000.000     | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 50.000.000     |
| 2.15.05.1.06    | Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi                                                                                                                                                                                             | Persentase koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prov. Lampung |                        |                | 100%                   | 45.000.000     | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 50.000.000     | 100%                   | 50.000.000     |
| 2.15.05.1.06.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi (Rapat Koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api)                                                                                                                 | Prov. Lampung |                        |                | 6 Dokumen              | 45.000.000     | 6 Dokumen              | 50.000.000     | 6 Dokumen              | 50.000.000     | 6 Dokumen              | 50.000.000     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        | 12.000.000.000 |                        | 21.349.003.300 |                        | 22.099.003.300 |                        | 27.334.240.910 |                        | 33.658.042.525 |

Bandar Lampung, September 2021  
KEPALA DINAS

  
BAMBANG SUMBOGO, SE, MM.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710422 198503 1 002